



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**OPTIMALISASI PERAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM MENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA (STUDI TPI DEPOK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

TESIS

**JUMSIN SOBRI
120150205010**

**PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL**

**BOGOR
2017**



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**OPTIMALISASI PERAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM MENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA (STUDI TPI DEPOK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**JUMSIN SOBRI
120150205010**

**PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN**

**BOGOR
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Jumsin Sobri
NPM : 120150205010
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan
Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Sains bidang Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I
Laksda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M (.....)

Pembimbing II
Marsma TNI Dr.Tatan Kustana, M.Bus. M.A (.....)

Penguji I
Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J. Rumambi., M.M (.....)

Penguji II
Letkol Sus Dr. Halkis M.A (.....)

Penguji III
Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : September 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Jumsin Sobri
NPM : 120150205010
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan
Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Sains bidang Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

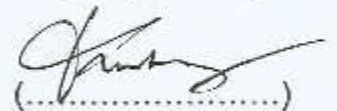
Laksda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M



(.....)

Pembimbing II

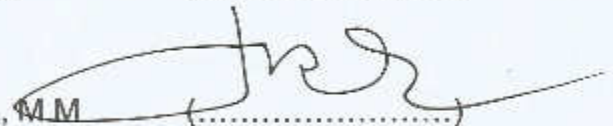
Marsma TNI Dr. Tatan Kustana, M.Bus. M.A



(.....)

Penguji I

Kolonel Laut (KH) Dr. Freddy J. Rumambi., M.M



(.....)

Penguji II

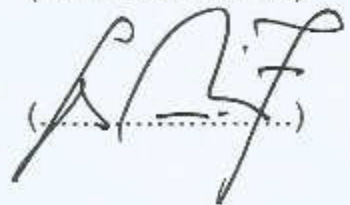
Letkol Sus Dr. Halkis M.A



(.....)

Penguji III

Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si



(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : September 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, September 2017

Jumsin Sobri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas limpahan karunia yang tak ternilai yang Allah SWT berikan. Tiada kata lain yang dapat penulis haturkan kecuali mengucapkan “Alhamdulillahirabbil’alamin”, serta puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada program Magister Sains Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia pada Fakultas Keamanan Nasional untuk Program Studi Keamanan Maritim.

Dalam proses penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Laksda TNI Dr.Ir. Supartono, M.M, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga akhirnya tesis ini selesai disusun. Semoga kesuksesan, kesehatan serta kebahagiaan selalu menyertai Bapak.
2. Marsma TNI Tatan Kustana, M.Bus. M.A, selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan support, bersabar, dan sangat percaya kepada penulis, dan juga sangat mendukung serta membantu terpecahkannya berbagai masalah dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Tomy Winata selaku komisaris PT, Bank Artha Graha Internasional, tbk yang telah banyak memberikan arahan serta keleluasaan waktu selama proses belajar di Universitas Pertahanan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dalam meraih gelas magister sains ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor.

4. Pak Heri, Mba Neni dan seluruh staf pengajar Program Studi Keamanan Maritim dan Fakultas Keamanan Nasional, yang telah banyak membantu penulis dalam selama proses belajar dan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Narasumber yang telah bersedia menyediakan kesempatan, waktu dan perhatiannya bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penelitian ini dapat dilakukan dan Mbah Darjo selaku pemilik tempat kos di desa Manding kabupaten Bantul yang turut memberikan semangat serta mengajarkan bahasa jawa setiap harinya sehingga penulis merasa nyaman dan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah Swt.
6. Orang tua kami, Istri dan anak anak saya yang selalu senantiasa memanjatkan do'a serta memberikan dukungan bagi penulis dalam situasi dan kondisi apapun untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam mendapatkan gelar M.Si (Han).
7. Para sahabat dan teman Keamanan Maritim dan Ekonomi Pertahanan yang terus memberi semangat serta dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman AGN UNHAN (senior ataupun junior) yang turut memberikan arahan, keringanan dalam pekerjaan serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
9. Berbagai pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan bagi penulis sejak dimulainya perkuliahan sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada isi maupun materi tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna dalam perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Meskipun demikian penulis bertanggung jawab atas hasil penelitian dan isi tulisan ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

dan semoga Allah SWT memberikan balasan segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bogor, September 2017

Jumsin Sobri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumsin Sobri
NPM : 120150205010
Fakultas : Keamanan Nasional
Program Studi : Keamanan Maritim
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

OPTIMALISASI PERAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SEBAGAI
PUSAT PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA (STUDI TPI DEPOK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, September 2017
Yang Menyatakan,

Jumsin Sobri

ABSTRAK

Nama : Jumsin Sobri
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul : Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia jadi tidak berlebihan bila negara kita memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Potensi kelautan dan perikanan DIY masih belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terlihat dari data potensi kelautan dan perikanan yang besar namun di sisi lain, kebutuhan ikannya belum dapat dipenuhi secara mandiri. Tempat pelelangan ikan merupakan Salah satu infrastruktur ekonomi dasar yang harus ada di wilayah pesisir yang memiliki peran cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: a) peran TPI Depok sebagai pusat pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir, b) mengoptimalkan peran TPI Depok dalam mendukung pertahanan negara di kawasan pesisir. Penelitian ini melakukan analisis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara sebagai data primer serta pengumpulan dokumen, buku serta jurnal sebagai sumber data sekunder. Setelah itu dilihat bagaimana optimalisasi peran TPI untuk pengembangan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan negara. Hasil penelitian menunjukkan tempat pelelangan ikan Depok sudah dilaksanakan secara baik namun belum optimal menjalankan perannya dalam pengembangan masyarakat pesisir untuk mendukung pertahanan negara. Oleh karena itu diperlukan perbaikan terhadap kebijakan, manajemen, pengawasan mulai dari kementerian, dinas serta pihak-pihak terkait dalam sektor perikanan dan kawasan pesisir.

Kata Kunci : Peran, Tempat Pelelangan Ikan, Kesejahteraan, Pertahanan

ABSTRACT

Name : Jumsin Sobri
Study Program : Maritime Security
Title : *Optimizing the Role of Fish Auction Place (TPI) as Center for Development Welfare the Coastal Communities in Support of National Defense (Study of TPI Depok Special Region of Yogyakarta)*

Indonesia is the largest archipelagic country in the world so it is not excessive if our country has huge marine potential. The potential of marine and fishery of DIY is still not utilized maximally, it can be seen from the data of marine and fishery potential that big but on the other hand, the need of the fish can not be fulfilled independently. Fish auction site One of the basic economic infrastructure that must exist in coastal areas that have a role important enough to create a conducive climate in the marketing of fish to improve the welfare of coastal communities. This study aims to analyze: a) the role of TPI Depok as a center for coastal community welfare development, b) optimize the role of TPI Depok in supporting the country's defense in coastal areas. This research performs analysis with qualitative method with data collecting technique done by observation, interview as primary data and collecting document, book and journal as secondary data source. Afterwards it was seen how to optimize TPI's role for coastal community development in supporting state defense. The results show where the fish auction Depok has been implemented well but not yet optimally run its role in the development of coastal communities to support the country's defense. Therefore, it is necessary to improve policy, management, supervision from ministries, agencies and related parties in fisheries and coastal areas.

Keywords: Role, Place the fish auction, Welfare, Defense

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Optimalisasi.....	11
2.2 Teori Peran.....	12
2.3 Teori Kesejahteraan Sosial	14
2.4 Teori Manajemen	16
2.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	18
2.6 Teori Pengembangan Ekonomi	21
2.7 Ekonomi Maritim	22
2.8 Hubungan Antara Pembangunan Sumber Daya Maritim Dengan Aspek Pertahanan	24

2.9	Tempat Pelelangan Ikan	28
2.8.1	Pengertian Tempat Pelelangan Ikan	28
2.8.2	Fungsi, Tujuan, Dan Manfaat TPI	30
2.10	Penelitian Terdahulu	32
2.11	Kerangka Pemikiran	41
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	44
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Teknik Analisis Data	47
3.6	Prosedur Penelitian	50
3.6.1	Instrumen Penelitian	50
3.6.2	Pengujian dan Keterandalan Data	50
3.6.3	Tempat dan Waktu Penelitian	51
BAB 4	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Gambaran Umum TPI	53
4.1.1	Letak Geografis dan Keadaan Alam	53
4.1.2	Kependudukan dan Mata Pencaharian	55
4.1.3	Struktur dan Prasarana Sosial	57
4.1.4	Profil Tempat Pelelangan Ikan Depok	58
4.1.5	Potensi Perikanan	61
4.1.6	Nelayan	62
4.1.7	Perkembangan TPI Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul	63
4.1.8	Transformasi Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Pantai Depok	64
4.2	Hasil Penelitian	66
4.2.1	Peran TPI Depok di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir.....	66

4.2.2 Upaya Optimalisasi Peran TPI Depok Dalam Membangun Pertahanan Kawasan Pesisir	73
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta	4
Gambar 2.1 Konsep <i>sea power</i> DR. Geoffrey Till	41
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 3.1 <i>Components of Data Analysis: Interactive Model</i>	47
Gambar 4.1 Peta Citra Desa Parangtritis	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi TPI Mina Bahari Empat Lima	59
Gambar 4.3 Hasil Tangkapan Ikan di tahun 2015 dan 2016.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 2.1 <i>Classification by definition and characteristics of the ocean Economy</i>	23
Tabel 2.2 Review Studi Terdahulu	35
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Dalam Penelitian	45
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Jumlah Prosentase Penduduk Desa Parangtritis	56
Tabel 4.2 NamaTPI yang ada di Kabupten Bantul	63
Tabel 4.3 Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Nelayan dan KUB, dan Sarpras Lainnya Tahun 2012-2013	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Matriks Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan hampir 2/3 wilayahnya merupakan perairan. Hal ini telah ditegaskan dalam konstitusi kita yaitu pasal 25 A UUD 1945, jadi tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Pemerintah saat ini juga sedang menggalakkan program yang diarahkan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan dan sangat ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Salah satu contoh besarnya adalah gagasan pembangunan tol laut yang saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, letak geografis Indonesia yang sangat strategis yang berada di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional.

Indonesia sebenarnya sangatlah mampu untuk menjadi salah satu kekuatan maritim di dunia. Sejak dahulu, wilayah laut Indonesia merupakan jalur perdagangan laut antar bangsa di dunia. Namun, program besar haruslah diimbangi dengan kekuatan yang besar pula. Perlu adanya modal yang cukup besar untuk membangun kekuatan laut Indonesia saat ini, karena jika ingin menghasilkan *ultimate outcomes*, maka pembangunan pelayaran harus disertai pembangunan industri di sekitar lokasi dan *catchment area* pelabuhan. Semisal industri tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, pengolahan dan manufaktur, serta industri lainnya.

Dalam RPJMN 2015-2019 sudah dituangkan beberapa poin terkait pengembangan sektor maritim Indonesia, yaitu:

- a. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-

- pulau dan pendaftarannya; pengaturan dan pengendalian ALKI; serta penguatan lembaga pengawasan laut.
- b. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
 - c. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
 - d. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, penguatan SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir. (Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Reviuw Rencana Strategis 2012 – 2017)

Berdasarkan salah satu ringkasan RPJMN 2015-2019 diatas, salah satu bentuk pengembangan wilayah pertahanan adalah dengan membangun aspek ekonomi dibidang kemaritiman dan kelautan Indonesia yang nantinya dari pengembangan sektor ekonomi ini diharapkan warga negara khususnya wilayah pesisir dapat memiliki surplus ekonomi dalam kegiatan produksinya, yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pertahanan dan non pertahanan. Sedangkan sasaran utama pembangunan ekonomi dalam bidang maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi untuk mendukung sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut, serta upaya meningkatkan pelayaran angkutan laut dan konektivitas laut.

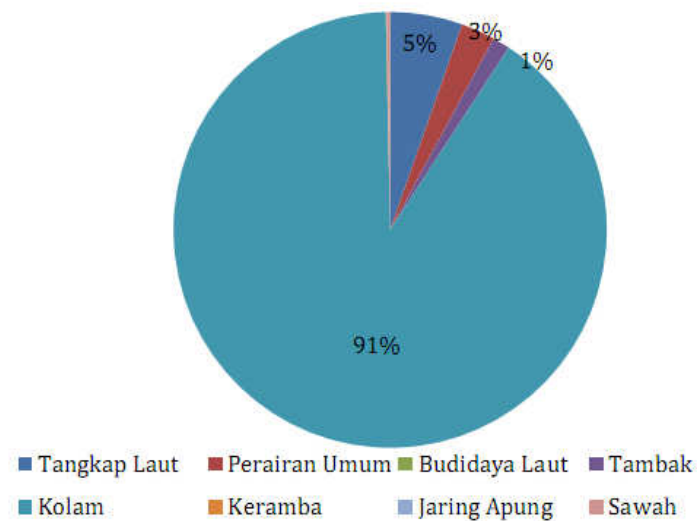
Potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia harusnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, namun untuk itu Indonesia harus memiliki sumber daya manusia atau kinerja yang profesional guna

meningkatkan dan menjaga potensi tersebut. Potensi sumberdaya alam tersebut mencakup sumberdaya alam yang dapat diperbaharui antara lain ikan laut, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain mineral dan tambang. Potensi-potensi sumberdaya alam tersebut mempunyai prospek pengembangan sektor perekonomian wilayah untuk saat ini dan di masa mendatang yang sangat berperan bagi upaya pembangunan wilayah maupun nasional.

Dalam hal ini, nelayan adalah SDM yang paling berkuat di dalamnya. Dalam perencanaan pembangunan, SDM sangatlah mempengaruhi dalam penempatan ruang dan lahan, dimana semakin meningkatnya SDM maka semakin meningkat pula keutuhan akan lahan atau ruang. Disisi yang lain, pertumbuhan tersebut memicu adanya pembangunan yang nantinya akan dapat berdampak positif atau mungkin negatif, diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. (Taufik Karim, Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kota Ternate, 2015).

Salah satu daerah pesisir yang saat ini fokus terhadap pengembangan sektor maritim dan kelautan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi sumber daya kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah besar. Dimana DIY memiliki panjang pantai lebih dari 113 km dengan potensi perikanan tangkap mencapai 491.700 ton per tahun di laut selatan pulau Jawa, sedangkan potensi lahan budidaya ikan mencapai 18.129,3 Ha. Jumlah ini belum ditambah dengan potensi sumber daya lahan pesisir yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya tambak maupun kolam budidaya (terpal) yang kurang lebih seluas 650 Ha.



Gambar 1.1 Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: BPS 2013

Menurut data BPS diatas, sebagian besar produksi ikan terbanyak berasal dari budidaya ikan di kolam tambak serta perikanan tangkap laut. Potensi perikanan air laut Provinsi DIY meliputi kelompok ikan pelagis besar berupa tongkol, tuna, cakalang dan cucut; kelompok ikan pelagis kecil seperti kembung, tongkol kecil, layang; kelompok ikan demersal seperti bawal layur, mayung, tiga wajah, udang; kelompok karang seperti lobster, ikan hiu, krapu, kakap. Hasil produksi ikan terbanyak tahun 2013 di DIY adalah perikanan budidaya kolam sebesar 57.006 ton.

Pakar Perikanan Universitas Gadjah Mada, Rustadi, berpendapat bahwa DIY memiliki potensi kelautan yang dapat dikembangkan. Perikanan adalah salah satu lahan yang paling potensial untuk dikembangkan. DIY memiliki wilayah perikanan yang cukup banyak, laut, sungai dan darat. Namun, data mengatakan dimana produksi perikanan DIY masih belum dapat mencukupi kebutuhan daerah ini sendiri, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sangat mendasar dimana kurangnya daya tarik masyarakat dengan menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian, semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi, peduli

lingkungan, dan mitigasi bencana pesisir, ditambah konsumsi ikan perkapita DIY yang masih cukup rendah ditingkat nasional (Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta).

Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut di DIY untuk saat ini dirasa masih belum optimal pengelolaannya, karena upaya eksploitasi yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga masih banyak potensi sumberdaya yang belum tergali dan teridentifikasi. Upaya eksploitasi yang telah dilakukan cenderung kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang ada (*sustainable*), sehingga akibatnya potensi sumberdaya alam tersebut di masa mendatang dapat terancam keberadaannya. Aspek kelestarian lingkungan dipengaruhi adanya kegiatan di darat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya peran lembaga atau organisasi yang mewadahi dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi pesisir. Agus Syarif (2011:69) menyatakan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu infrastruktur ekonomi dasar yang semestinya ada di wilayah pesisir dimana terdapat sentra-sentra nelayan di dalamnya. Mahyuddin (2001) mengatakan bahwa aktivitas pelelangan ikan di TPI merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yang disepakati bersama. Karena pelelangan ikan adalah salah satu mata rantai tata niaga ikan.

Menurut Susilowati, 2004 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bertugas dalam menyelenggarakan pemasaran atau pelelangan hasil tangkapan nelayan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja serta meningkatkan nilai tawar nelayan ketika berhadapan dengan pedagang dengan menciptakan harga dan sistem pembayaran yang layak

tanpa merugikan pedagang. Tri Widyawati (2008: 8) menyatakan bahwa pengelola tempat pelelangan ikan dan pengurus KUD merupakan dua unsur yang terkait dalam mengatur pemasaran hasil tangkapan nelayan. Mereka adalah bagian dari sistem kelembagaan dalam perikanan yang memiliki andil dalam menentukan kesejahteraan nelayan. Proses peningkatan keberdayaan nelayan menuntut peran mereka dalam mengelola sumberdaya perikanan. (Saputri, Rani Danik, Bentuk Interaksi Nelayan Di TPI Mina Bahari Empat Lima Depok Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta, 2013)

Saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 18 tempat pelelangan ikan yang masih aktif dan sudah beroperasi sejak lama, beberapa diantaranya adalah TPI Depok yang sudah beroperasi sejak 1997, TPI Sadeng, serta TPI Gadingmas dan TPI Patehan di wilayah Pantai Samas dan Pantai Gua Cemara yang belum lama diresmikan. Dan beberapa TPI lainnya.

Melihat potensi kelautan dan perikanan di DIY, maka perlu adanya langkah optimalisasi bisnis perikanan daerah pesisir laut selatan DIY. Melihat jumlah masyarakat kelas menengah di DIY juga terus meningkat sedangkan jumlah tangkapan ikan hingga saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan. Dengan kondisi tersebut menjadikan peluang bisnis dan pasar ikan semakin terbuka lebar untuk masyarakat DIY.

Kawasan pesisir Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah dan sangat baik untuk memajukan perekonomian daerah. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang luas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia untuk memajukan perekonomian daerah dengan pengembangan kawasan pesisir.

Di dalam kawasan pesisir nelayan merupakan tokoh sentral di dalamnya, kesejahteraan nelayan sangat penting keberadaannya. Dalam hal ini perlu melihat bagaimana peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Karena, jika melihat

fungsi PPI/ TPI yang dinyatakan dalam Aswan Sakumoto (2003: 14) adalah sebagai berikut:

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan;
- b. Tempat berlabuhnya kapal perikanan;
- c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;
- d. Tempat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat kapal-kapal perikanan;
- e. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan;
- f. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan;
- g. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. (Wibowo, Dyan, Dermaga Kapal Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan Regional Kabupaten Bantul, 2005)

Jadi, fungsi dari TPI dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu

- a. fungsi maritim (tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal)
- b. fungsi komersial (menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan), dan
- c. fungsi jasa (jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa TPI merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak pada sektor pemasaran hasil tangkapan ikan yang diharapkan dapat berperan penting dalam membantu penjualan dan memberikan perlindungan bagi para nelayan terutama dalam permainan harga yang dilakukan para pedagang. Ditambah permasalahan pemberdayaan masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan juga menjadi bagian dalam fungsi dari TPI yang berperan sebagai pusat pengembangan wilayah pesisir.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat kesesuaian peran TPI sebenarnya dengan melihat fungsi dan peranan TPI sebagai aktor perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai upaya

dalam mengembangkan dan memaksimalkan peran TPI di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengembangkan ekonomi sektor maritim dengan judul **“Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya kajian tentang Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah pesisir. Berangkat dari permasalahan ini, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengoptimalkan peran TPI Depok di DIY dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir?
- b. Bagaimana upaya mengoptimalkan peran TPI Depok dalam mendukung pertahanan negara di kawasan pesisir DIY?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Mengacu pada pertanyaan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Menganalisis peran TPI Depok di DIY sebagai pusat pengembangan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
- b. Menganalisis cara mengoptimalkan peran dan yang dilakukan TPI Depok dalam mendukung pertahanan negara di kawasan pesisir khususnya pada sektor ekonomi maritim DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yaitu pengembangan TPI dari perspektif ekonomi dibidang maritim dan kelautan.

- b. Manfaat Praktis. Kontribusi praktis berupa pertimbangan bagi pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan institusi terkait khususnya Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan TPI.

1.5 Ruang Lingkup

Untuk menjaga agar penelitian ini lebih terarah dan fokus maka diperlukan adanya ruang lingkup atau pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengolahan data baik melalui wawancara, telaah dokumen, maupun sumber data lain yang dinilai perlu untuk dilakukan. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi terkait dengan peran TPI Depok di Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana dampak terhadap kesejahteraan bagi nelayan dilihat dari perspektif ekonomi pertahanan. Selain itu peneliti juga berusaha melihat bagaimana peran kementerian atau lembaga terkait sinergitas antara keamanan dan pertahanan kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, penyusunan tesis ini akan terbagi menjadi 5 bab, dengan pembagian secara garis besar sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN:** Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu maupun referensi-referensi seputar peran, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Ekonomi Maritim.
- BAB 3 METODE PENELITIAN:** Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai, desain penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data, prosedur penelitian, definisi operasional, dan rencana jadwal penelitian.

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN: Bab 4 menjelaskan mengenai hasil-hasil temuan dari penelitian yang dilakukan yang mencakup gambaran data, analisa data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN: Bab 5 merupakan bab penutup yang berisikan Simpulan dan Saran dari analisa yang dilakukan oleh peneliti.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Optimalisasi

Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997: 753) dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1999: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Optimalisasi juga merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternative solusi yang ada dengan menggunakan formulasi matematika. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada (Sianturi, 2012).

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal dalam mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Jika dikaitkan dalam asset, Menurut Siregar (2004), ini merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Secara umum tujuan optimalisasi aset dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset yang meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonomisnya.

Ada beberapa pengertian optimal menurut beberapa pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Optimal merupakan jumlah, derajat, atau sesuatu yang paling disukai, bisa dicapai dalam suatu kondisi tertentu. Optimum tidak berarti maksimum, karena optimum mempertimbangkan juga faktor faktor batasan atau konstan. Kata optimum mengacu kepada kualitas bukan kuantitas, ini berarti yang terbaik bukan yang terbesar.
- b. Optimal adalah berusaha untuk memaksimalkan sesuatu yang diinginkan (Sisdjiatmo, 1983. Hal. 266). Dari beberapa pengertian mengenai optimalisasi aset, maka dapat disimpulkan optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahap ini aset-aset yang dimiliki pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Analisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset yang masuk ke dalam aset operasional atau aset non operasional (Siregar, 2004). Untuk aset operasional, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal atau belum penggunaan dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk analisis terhadap aset non operasional yang dilakukan terhadap kondisi eksisting suatu aset. Untuk mengetahui pemanfaatannya sudah optimal, dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis. Analisis ini mencakup regulasi, peruntukan, dan pengembangan kawasan sekitar. (DRS. Sisdjiatmo Kusumosuwisho, Sajian Dasar Dalam Pengantar Teori Ekonomi Mikro, 1983 Hal. 266).

2.2 Teori Peran

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat". Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan mempengaruhi sesuatu yang lain. Peranan bersinonim dengan "pengaruh". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "pengaruh" berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah "daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Hal tersebut senada bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2014:210).

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23).

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai "sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto (1979: 94) menyatakan bahwa

peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (John M. Echlos, 2000: 489)

Dari definisi peranan diatas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain, baik positif maupun negatif yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang dapat mengubah dan membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan dari organisasi atau masyarakat.

2.3 Teori Kesejahteraan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya sangat berkaitan dan terus terhubung satu dengan yang lainnya. Menurut Walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Arthur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Harold L. Wilensky (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lalu menurut Zastrow (2000) kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Berdasarkan pendapat dan definisi tentang kesejahteraan sosial menurut para pakar dan ahli, kesejahteraan sosial merupakan dampak yang ditimbulkan dari sebuah sistem yang terorganisir sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial tiap warga

Negara sehingga mereka mampu untuk menjalankan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan dasar dari setiap makhluk sosial yang ada di lingkungannya.

Kesejahteraan sosial dapat diukur dengan menggunakan beberapa ukuran seperti tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup, dan pembangunan manusia. Di Jepang, ada istilah yang namanya *seikatsu hogo* atau perlindungan hidup yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Dengan kata lain, *seikatsu hogo* merupakan jaminan perlindungan terhadap standard hidup semua warga Negara Jepang dan tidak boleh ada diskriminasi, serta bagi masyarakat miskin dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah (Kennett dan Iwata, 2003:63).

Menurut Okamura dan Takehara (2005:114), untuk dapat memahami masalah kesejahteraan sosial, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mengetahui keadaan dari masalah sosial tersebut sehingga nantinya akan didapatkan karakteristik dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Selanjutnya, dia menjabarkan bahwa ada tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Tuntutan ekonomi yang stabil
- b. Tuntutan pekerjaan yang layak
- c. Tuntutan keluarga yang stabil
- d. Tuntutan jaminan kesehatan
- e. Tuntutan jaminan pendidikan
- f. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat dan
- g. Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi.

2.4 Teori Manajemen

Menurut Allport, G.W. (1993:18) dalam bukunya *Personality: A psychological interpretation*. Definisi manajemen adalah “proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah

penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan “

Menurut James A.F. Stonner yang dikutip oleh Handoko, Hani; (1993:14) dalam bukunya “*Manajemen*”: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan”.

Menurut Siagian dalam buku “*filosof administrasi*” management dapat didefinisikan sebagai “*kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain*”. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa management merupakan inti daripada administrasi karena memang management merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi”

Chaster I Bernard, yang dikutip oleh Handoko, Hani; (1993:15) menyatakan bahwa Manajemen adalah seni dan ilmu. Sedangkan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Handoko, Hani; (1993:15): Manajemen adalah *prevoir, organizer, commander, coordinator, controller* dan menurut James A.F. Stoner (1999:8) Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, pengawasan dari upaya dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Winardi (1986:4) dalam bukunya Manajemen dalam pendekatan Sistem adalah “Manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber–sumber lainnya”.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Unsur-unsur manajemen terdiri dari: man, money, method,

machines, materials dan market. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.5 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM adalah suatu upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan (Silalahi, 2000:249). Pengembangan merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang di hadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusangan karyawan, perubahan-perubahan sosioteknis dan perputaran tenaga kerja. Kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan departemen personalia dalam mempertahankan sumber daya manusia yang efektif (Handoko, 2008: 117).

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan dimana karyawan didorong belajar berkembang (Sedarmayanti, 2008:167). Karena pengembangan dipandang sebagai peningkatan SDM melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Apa yang dapat dijelaskan dari pengembangan sumber daya manusia adalah tentang *developmental practice* dan membutuhkan kolaborasi-kolaborasi dengan program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelatihan yang membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Pengembangan mempunyai lingkup yang lebih luas. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan umum jangka panjang organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pengembangan juga membantu para karyawan untuk mempersiapkan diri

menghadapi perubahan dipekerjaan mereka yang dapat diakibatkan oleh teknologi baru, desain pekerjaan, pelanggan baru, atau pasar produk baru.

Pengembangan SDM dapat digolongkan dalam dua bentuk, menurut Hasibuan (2008: 72), bentuk pengembangan dikelompokkan atas:

- a. Pengembangan Informal, yaitu, karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena produktivitas kerja karyawan semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik.
- b. Pengembangan Formal, yaitu, karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga–lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan di perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang, sifatnya non karier atau peningkatan karier seorang karyawan.

Berbicara pengembangan juga tak lepas dari pemberdayaan setelahnya. Keberadaan SDM dalam manajemen sungguh sangat strategis bahkan merupakan kunci untuk keberhasilan manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. Hal ini dapat dimaklumi karena betapapun ketersediaan dan kelengkapan sumber-sumber lainnya hanya dapat bermanfaat, apabila sumber-sumber tersebut diberdayakan oleh Sumber Daya Manusia yang tepat dan handal. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa usaha pencapaian tujuan organisasi menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena daya dalam Sumber Daya Manusia tidak menunjukkan dan tidak menggambarkan sebagaimana diharapkan. Artinya daya yang bersumber dari manusia berupa tenaga atau kekuatan yang ada pada diri manusia itu sendiri tidak mampu memberdayakan sumber-sumber lainnya

(Non Human Resources) sehingga tidak memberi manfaat/ hasil dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan Pemberdayaan SDM adalah terwujudnya SDM yang mempunyai/memiliki kemampuan (competency) yang kondusif, adanya wewenang (authority) yang jelas dan dipercayai serta adanya tanggungjawab (responsibility) yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi.

Sumber Daya Manusia dalam organisasi sangat strategis dan menentukan, bahkan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan justru ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya. Oleh karena itu sumber daya manusia selaku pegawai yang tidak memberi "Daya" adalah tidak dikategorikan sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan itu, maka aspek-aspek atau komponen-komponen yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia adalah:

- a. Kemampuan (competency) pegawai meliputi: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap atau perilaku (attitude);
- b. Penempatan pegawai yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam suatu organisasi;
- c. Kewenangan yang jelas, artinya seseorang pegawai yang ditempatkan atau yang disertai tugas, harus jelas kewenangannya dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam setiap melakukan kegiatan;
- d. Tanggungjawab pegawai yang jelas, artinya seorang pegawai harus diberi tanggung jawab yang jelas sehingga tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatannya;
- e. Kepercayaan terhadap pegawai yang bersangkutan dan Dukungan terhadap pegawai yang bersangkutan;
- f. Kepemimpinan (leadership) adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- g. Motivasi, merupakan semua kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang memberi daya, memberi arah dan memelihara tingkah laku.

2.6 Teori Pengembangan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan xini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. (Jhingan, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. (Asfia, 2009).

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992).

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya kegiatan perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini nantinya akan menciptakan alur yang berhubungan dengan faktor produksi.

Todaro (1998) menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lainnya, sehingga akan menimbulkan proses pertumbuhan. Selanjutnya Beliau mengatakan bahwa ada tiga faktor komponen utama yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001), ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi di era modern ini. Hal ini juga sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitik beratkan pada modal dan tenaga kerja, serta pembentukan teknologi sebagai sebuah unsur baru.

2.7 Ekonomi Maritim

Ekonomi Maritim berasal dari dua kata dalam kegiatan yang berbeda. Ekonomi sendiri dapat diartikan dalam berbagai bentuk, diantaranya Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi di antara konsumsi banyak orang. Produksi adalah menciptakan guna (*utility*) atau menghasilkan output yang berguna bagi perekonomian dan masyarakat, konsumsi adalah sebaliknya dari produksi, yaitu mengurangi guna. Transaksi adalah kesepakatan oleh beberapa pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan (misal jual beli barang), dan Ilmu Ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan, mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumberdaya produksi yang langka atau terbatas (misalnya tanah, tenaga kerja, mesin dan keterampilan teknis) untuk memproduksi berbagai komoditas (seperti beras, pakaian, jalan, dan televisi) dan menyalurkan ke berbagai masyarakat untuk digunakan untuk konsumsi (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1985).

Maritim sendiri dikonotasikan dengan kegiatan masyarakat yang terletak dekat pesisir pantai beserta kegiatan yang dilakukan di perairan atau laut, atau dapat dikatakan terdapat interaksi antara sumberdaya manusia (penduduk) di daerah pesisir pantai dengan berbagai kegiatan, terutama dalam penangkapan ikan di laut, pemanfaatan sumberdaya

kelautan lainnya, industry maritim, transportasi laut, pemasaran hasil-hasil laut, dan perdagangan antar pulau.

Tabel 2.1 *Classification by definition & characteristics of the ocean economy*

Characteristics	Classification
In the Ocean	Aggregates, aquaculture, cruise, oil & gas E&P, fisheries, leisure, marine construction, marine mining, marine tourism, minerals, non-living things, ocean renewable energy development, offshore supply services, recreation, seawater utilization, shipping, transportation, defense, marine environment management, safety, security, Navy, observation
From the Ocean	Costal tourism , marine bio industry, marine chemical industry, seafood processing
To the Ocean	Boat building, cables, communication, high tech marine products and services, marine applications, marine business services, marine equipment manufacturing, marine engineering, marine insurance, marine materials, marine sensors, marine technical services, offshore plant building, OSV building, port development , port management, port operation, rental, ship building, research & development, education, license, navigation, public administration, training

Sumber: *Journal of Ocean and Coastal Economics, 2014*

Tabel 2.1 di atas menunjukkan karakteristik lingkup ekonomi laut dapat dikategorikan menjadi tiga frase: di laut, dari laut dan ke laut. Di laut berarti kegiatan ekonomi yang terjadi di laut untuk digunakan, melindungi, penelitian dan mengembangkan laut. Dari laut berarti kegiatan ekonomi yang menerima barang dan jasa dari suatu kegiatan laut untuk menggunakan, melindungi, meneliti dan mengembangkan laut. Terakhir, ke laut berarti kegiatan ekonomi yang menyediakan input untuk kegiatan laut. (*Journal of Ocean and Coastal Economics, 2014*).

Ekonomi sendiri sangat berkaitan dengan alokasi sumber-sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, misalnya memilih cara-cara dan teknik-teknik yang ada guna menghasilkan alat pemuas kebutuhan untuk memberikan nilai guna. Mengekonomiskan sama halnya dengan berusaha menambah sumber daya yang satunya dan mengurangi sumber daya lainnya.

Laut merupakan sumber daya besar yang dimiliki Indonesia, dimana terdapat budidaya, *cruise*, minyak lepas pantai dan gas E & P, perikanan dan sebagainya yang secara tidak langsung terdapat aktivitas negara dan hubungan kerjasama antar kawasan. Hal ini menjadi faktor penting yang

terdapat di dalamnya. Sehingga konsep pertahanan laut yang diterapkan di negara dengan sumber daya laut melimpah sangatlah kompleks.

Indonesia sendiri menerapkan sistem pertahanan semesta dimana suatu pertahanan yang melibatkan seluruh komponen nasional untuk ikut serta dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta. Oleh karena itu, pertahanan semesta juga meliputi mengenai pertahanan kawasan dan didalamnya terdapat faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan ekonomi kelautan. Untuk menentukan ruang lingkup ekonomi laut, klasifikasi masing-masing negara membutuhkan penelaahan. Untuk tujuan ini, kita dapat menerapkan dua standar klasifikasi berikut:

- a. Klasifikasi dengan definisi dan karakteristik dari ekonomi laut;
- b. Klasifikasi oleh rantai pasokan dan hubungan antara berbagai komponen ekonomi laut

Salah satu komponen Maritim adalah kawasan pesisir. Pengembangan kawasan pesisir berupaya untuk menciptakan sebuah kemandirian ekonomi guna menciptakan masyarakat yang mampu mandiri secara finansial khususnya bagi yang mencari penghasilan dari sektor perikanan. Dari hal peningkatan tersebut, nantinya akan diuntungkan dari kontribusi dalam bentuk pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pertahanan dan non pertahanan. (Yusgiantoro, Purnomo, *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*, 2014: 9).

2.8 Hubungan antara Pembangunan Sumber Daya Maritim dengan Aspek Pertahanan.

Pemahaman Negara Maritim diawali dengan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan nusantara, UU No 4/60 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Isi Deklarasi "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau

perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang". Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kelautan Nasional. Substansinya adalah menyebut Negara Kesatuan RI beserta perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinennya sebagai Negara Maritim Indonesia.

Perkembangan Wawasan dan Pembangunan Kelautan. Pada tanggal 26 September 1998 kembali dicanangkan Deklarasi Bunaken dengan tindak lanjut *The Ocean Charter*. Isi 3 Deklarasi: Mulai saat ini visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi laut. Semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia.

Visi Kelautan terus berkembang hingga era reformasi dengan Pembangunan Maritim Indonesia (1998-2004) mencakup aspek: Perikanan, Pehubungan laut, Industri Maritim, Pertambangan dan Energi, Wisata Bahari, Pembangunan SDM, IPTEK dan Kelembagaan Maritim. Berdirinya Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan (1999-2004) dengan tindak lanjut dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut yang akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan *World Ocean Conference 2009* di Manado yang juga telah menunjukkan peran dan wawasan kelautan bangsa Indonesia kepada dunia Internasional.

Gagasan Negara Maritim Indonesia sebagai aktualisasi wawasan nusantara untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi wawasan nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagikesejahteraan

bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

Pengembangan negara maritim Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 karena dalam prikehidupan kebangsaan Indonesia Pancasila pada hakekatnya disusun secara serasi dan seimbang untuk mewadahi seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Landasan konsepsionalnya adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dengan wawasan nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional, maka konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dan upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Laut yang melingkupi dan memangku kepulauan nusantara merupakan satu keutuhan wilayah nasional Indonesia, sekaligus sebagai faktor penentu terwujudnya kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dalam kesatuan pertahanan dan akhirnya juga kesatuan pengamanan yang mantap.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, kemampuan pertahanan nasional di wilayah laut dan udara tentunya harus menjadi perhatian yang serius untuk ditingkatkan, terutama kemampuan mobiltas nasional dengan transportasi (darat, laut dan udara) dan logistik terpadu dalam pangkalan dan pertahanan di laut wilayah (*teritorial sea*), hingga ke laut lepas.

Ancaman terhadap wilayah pantai di Indonesia juga dapat datangnya dari bencana alam gempa bumi dan diikuti oleh tsunami. Bencana

akibat gempa bumi dan tsunami ini terjadi karena adanya gerakan tektonik di bawah dasar laut. Oleh karena itu, pantai- pantai yang rawan gempa bumi dan tsunami adalah pantai-pantai yang berhadapan dengan daerah penunjangan (subduksi) antara dua lempengan tektonik Eurasia dan Australia disebelah barat Sumatera, diselatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT, maupun pantai- pantai di sebelah Utara dan Timur dari Indonesia bagian Timur, sebagai akibat subduksi antara lempengan Pasifik dan Eurasia.

Pemanfaatan Data dan Informasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan dalam Aspek Sistem Pertahanan Laut. Dalam rangka Sistem Pertahanan Laut, data dan Informasi kelautan diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi pertahanan di wilayah laut. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai fungsi Intelejen Maritim dan fungsi Pengamatan dan penelitian laut.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Maritim untuk Mencapai Ketahanan Nasional. Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya laut, pemerintah dan bangsa Indonesia membuat satu kebijakan yang strategis dan antisipatif yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri. Kebijakan ini perlu ditindak lanjuti dengan penepatan kebijakan dan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan untuk mencapai ketahanan nasional, argument ini paling tidak didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu:

- a. Pembangunan wilayah maritim adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Alasan ini membawa implikasi bahwa kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang diterapkan harus bersifat menyeluruh (holistik) dan terpadu antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
- b. Bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah maritim yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti bahwa Negara mampu mencapai ketahanan nasional secara mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

2.9 Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2.9.1 Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999).

Ikan merupakan komoditi yang mudah busuk. Sesudah diangkat dari kapal, ikan harus segera ditangani secara tepat untuk mempertahankan mutu ikan secara maksimum. Sistem pemasara menjadi kompleks karena sifatnya yang mudah busuk.

Beberapa cara pelayanan untuk mendistribusikan produk perikanan yang dapat dilakukan:

- a. Melalui tempat pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dan pasar induk di luar kota sebelum akhirnya sampai pada konsumen.
- b. Diangkut dengan kapal langsung ke pasar di kota konsumen tanpa melewati tempat pelelangan ikan
- c. Para pengolah membeli ikan untuk bahan mentah ditempat pelelangan.

d. Setelah membeli ikan di pelelangan, tengkulak memasok para konsumen di lingkungan perkotaan seperti restoran, pabrik, rumah sakit, pasar swalayan, dan sebagainya.

Hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal ikan perlu mendapat pelayanan yang memudahkan terlaksananya pekerjaan dalam serangkaian proses seperti sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan, dan pengepakan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut. Setelah itu ikan dikirim sebagian untuk dikonsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke pabrik untuk *processing* dan sisanya ke tempat pembekuan ikan untuk diawetkan (Sulistiyani dyah, 2005:26)

Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap pangkalan pendaratan ikan (PPI). Dengan demikian TPI merupakan bagian dari pengelolaan PPI fasilitas lain yang disediakan oleh PPI adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam, pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, MCK, keamanan dan lain sebagainya.

Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. (Kartodirdjo, Sartono: 1993). Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. (Kusnadi, 2003) Masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. (Kartodirdjo, Sartono. 1993).

Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Yang harus diketahui bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut (Sutarno, 1999).

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat pesisir juga dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Aktivitas nelayan juga dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, jika cuaca baik maka para nelayan akan banyak menghasilkan ikan namun sebaliknya jika cuaca buruk hasil yang didapatkan oleh nelayan akan sedikit. (Torresan et al. 2007).

2.9.2 Fungsi, Tujuan, Dan Manfaat TPI

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat

dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi marketing center. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran (*market channel*) yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah:

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
- b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Mempermudah pengumpulan data statistik.

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktur Bina Prasarana Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi semakin nyata;
- b. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien;
- c. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan.

Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah:

- a. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
- b. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan jika TPI merupakan pusat dari pengembangan masyarakat pesisir dimana nelayan

merupakan aktor utama yang harus diberdayakan keberadaannya, baik dalam perawatan lingkungan laut, ataupun dalam mengembangkan serta memaksimalkan potensi kelautan di daerah pesisir. Selain itu, ada beberapa fungsi lain, yaitu TPI sebagai tempat berlabuhnya kapal, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar bongkar muat kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan, serta pusat penyuluhan dan pengumpulan data.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, peneliti menemukan penelitian sejenis dalam bentuk artikel jurnal penelitian yang kemudian dijadikan sebagai acuan penulis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Andina Ramadhani Putri Pane (2013) yang berjudul “Kompetensi Manajer Dalam Meningkatkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Samudera Mina Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang” yang menemukan bahwa kompetensi Manajer TPI memerlukan pengembangan dan terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya infrastruktur yang kurang memadai baik dari jalan darat maupun pendangkalan muara, masih terdapat penimbangan liar diluar TPI, fasilitas yang belum memadai dan mendukung, penanganan ikan serta harga penetapan ikan yang dirasa masih sangat murah dan merugikan nelayan, serta kompetensi dari manajer yang masih belum memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Sebagai kelanjutan dari permasalahan yang ada, peneliti memberikan saran rekomendasi berupa peningkatan kompetensi manajer TPI melalui pendidikan dan pelatihan, komunikasi intensif manajer dengan pengurus dan pengguna, pembinaan dari instansi terkait, pemilihan manajer agar memperhatikan tingkat pendidikan dan kompetensi lainnya, menjadikan pelelangan ikan Samudera Mina sebagai percontohan pelelangan di Kabupaten Karawang, perbaikan fasilitas dan menganggarkan dana untuk perbaikan fasilitas tersebut.

Penelitian selanjutnya oleh Lukman Adam (2012), yang berjudul “Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)” yang menemukan bahwa kondisi sumber daya perikanan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi output maupun input.

Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistic, tidak hanya pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak, dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Saran dan rekomendasi dari peneliti adalah diharapkan adanya keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, keberpihakan terhadap Nelayan, penataan kelembagaan lokal, pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan penetapan hak bagi para nelayan.

Penelitian selanjutnya dari Muhammad Wahyu Dianto, dkk (2012) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur” yang menemukan bahwa pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Popoh ini belum maksimal berjalan dengan baik, karena penggantian manajemen, fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik dan penawaran yang ditawarkan tidak berjalan secara murni. Penghitungan tingkat kesejahteraan berdasarkan NTN pendapatan dan pengeluaran tiap harinya menghasilkan bahwa penerimaan keluarga nelayan saat itu masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Popoh (TPI Popoh) belum berjalan sebagaimana mestinya.

Saran dan rekomendasi dari peneliti adalah pengelola TPI atau kinerja di TPI Popoh diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola TPI dengan baik lagi, fungsi TPI sesuai di Undang-Undang yang berlaku dan dapat menguntungkan para nelayan di Popoh, dan masih perlu meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan disektor perikanan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dan yang terakhir adalah penelitian dari Sandi Hertanto, dkk (2013) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan TPI di Kabupaten Jepara sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2010 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan. Pemerintah juga membentuk UPT yang dirasa tepat dalam optimalisasi peran TPI, namun, banyak pengelola yang masih rangkap jabatan menyebabkan kurang efisiennya kinerja pegawai tersebut ditambah lagi banyak nelayan yang belum sadar dan tahu akan peraturan daerah Kabupaten Jepara. Saran dan rekomendasi, melibatkan tokoh masyarakat dalam pengelolaan TPI serta dalam sosialisasi peraturan daerah.

Tabel 2.2 Review Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Temuan dan Hasil
1	Andina Ramadhani Putri Pane, 2013	Kompetensi Manajer Dalam Meningkatkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Samudera Mina Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	Metode kualitatif menggunakan kasus tunggal (single case)	Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi Manajer TPI memerlukan pengembangan dan terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya infrastruktur yang kurang memadai baik dari jalan darat maupun pendangkalan muara, masih terdapat penimbangan liar diluar TPI, fasilitas yang belum memadai dan mendukung, penanganan ikan serta harga penetapan ikan yang dirasa masih sangat murah dan merugikan nelayan, serta kompetensi dari manajer yang masih belum memenuhi syarat sebagai pemimpin. Sebagai kelanjutan dari permasalahan yang ada, peneliti memberikan saran

				<p>rekomendasi berupa peningkatan kompetensi manajer TPI melalui pendidikan dan pelatihan, komunikasi intensif manajer dengan pengurus dan pengguna, pembinaan dari instansi terkait, pemilihan manajer agar memperhatikan tingkat pendidikan dan kompetensi lainnya, menjadikan pelelangan ikan Samudera Mina sebagai percontohan pelelangan di Kabupaten Karawang, perbaikan fasilitas dan menganggarkan dana untuk perbaikan fasilitas tersebut.</p>
2	Lukman Adam, 2012	Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara	Metode kualitatif deskriptif dengan melihat data dan indikator hasil data yang ada.	Kondisi sumber daya perikanan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang

		<p>Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)</p>	<p>berkelanjutan, maka perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi output maupun input.</p> <p>Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistic, tidak hanya pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan.</p> <p>Saran dan rekomendasi dari peneliti adalah diharapkan adanya keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, keberpihakan terhadap Nelayan, penataan kelembagaan lokal, pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan</p>
--	--	--	---

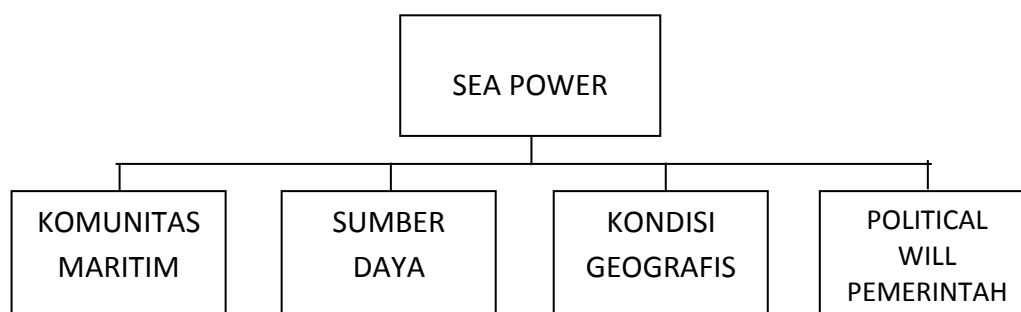
				perikanan budidaya, dan penetapan hak ulayat.
3	Muhammad Wahyu Dianto, dkk, 2012	Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	Penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Popoh ini belum maksimal berjalan dengan baik, karena penggantian manajemen, fungsi TPI sebagai penyelenggara pelelangan sekaligus pengontrol stabilitas harga ikan tidak terlaksana dengan baik dan penawaran yang ditawarkan tidak berjalan secara murni. Penghitungan tingkat kesejahteraan berdasarkan NTN pendapatan dan pengeluaran tiap harinya menghasilkan bahwa penerimaan keluarga nelayan saat itu masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan Unit Pelaksana

				<p>Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Popoh (TPI Popoh) belum berjalan sebagaimana mestinya.</p> <p>Saran dan rekomendasi dari peneliti adalah pengelola TPI atau kinerja di TPI Popoh diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola TPI dengan baik lagi, fungsi TPI sesuai di Undang – Undang yang berlaku dan dapat menguntungkan para nelayan di Popoh, dan masih perlu meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan di sektor perikanan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan yang berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--

4	Sandi Hertanto, dkk, 2013	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara	Metode kualitatif deskriptif	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan TPI di Kabupaten Jepara sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2010 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan. Pemerintah juga membentuk UPT yang dirasa tepat dalam optimalisasi peran TPI, namun, banyak pengelola yang masih rangkap jabatan menyebabkan kurang efisiennya kinerja pegawai tersebut. Banyak nelayan yang belum sadar dan tau akan peraturan daerah Kab. Jepara. Saran dan rekomendasi, melibatkan tokoh masyarakat dalam pengelolaan TPI serta dalam sosialisasi peraturan daerah.</p>
---	---------------------------	--	------------------------------	---

2.11 Kerangka Pemikiran

Menurut DR. Geoffrey Till (2003) menyatakan bahwa ada empat komponen dasar menuju terciptanya *sea power* sebagai negara basis maritim, yakni: masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (*maritime community*), sumber daya maritim (sumberdaya laut, infrastruktur, perkapalan), letak geografis, dan *political will* pemerintah. Keempat komponen tersebut merupakan syarat terciptanya pelabuhan laut yang dinamis dalam sistem perdagangan internasional, armada perkapalan nasional dan angkatan laut yang kuat. (Paradigma Geomaritim, 2015)



Gambar 2.1 konsep *sea power* DR. Geoffrey Till

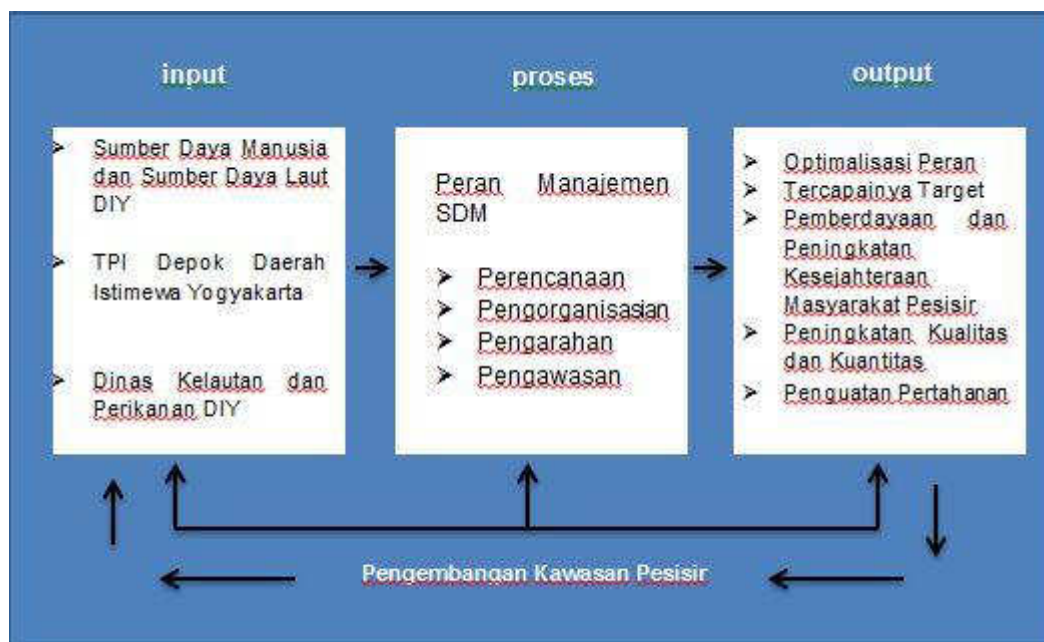
Berdasarkan konsep *sea power* DR. Geoffrey Till (2003), sumber daya merupakan salah satu dari 4 elemen pembentuk *sea power* di dunia. Salah satu elemen tersebut adalah sumber daya maritim, kawasan pesisir Indonesia yang sarat dengan sumber daya melimpah. Maka dari itu, pengembangan kawasan pesisir dirasa perlu sebagai salah satu bentuk implementasi pertahanan pada sektor maritim Indonesia. Merujuk pada teori yang digunakan, bagaimana satu kegiatan atau organisasi dapat mempengaruhi kegiatan lainnya dengan mengamati bagaimana optimasi suatu kegiatan, maka perlu adanya sebuah manajemen yang dapat mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang didalamnya mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa teori jika dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu optimalisasi peran TPI sebagai pusat pengembangan kawasan pesisir, maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana peran dan manajemen dari TPI Depok dengan melihat bagaimana proses dan program, baik berupa kebijakan atau penyuluhan atau pendampingan bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya bagi dinas pemerintah daerah terkait dalam mengembangkan kelautan dan perikanan di DIY.

Selanjutnya, dari hasil penelitian ini, maka diharapkan akan dapat dihasilkan bentuk optimalisasi yang sudah berjalan atau berupa saran dan program dalam mengembangkan sumber daya di wilayah pesisir. Nantinya, optimalisasi tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir, kualitas dan kuantitas tangkapan, dan juga akan berdampak pada sektor pertahanan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggambarkan penelitian ini kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk lebih menekankan pada proses dari hasil suatu aktivitas sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Menurut Sukmadinata (2005) dasar dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu, dan menurut Danim (2002) peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tempat Pelelangan Ikan Depok dan Sadeng dalam upaya dalam pengembangan kawasan pesisir dalam perspektif ekonomi, sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisa masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini, didalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini, dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada karena

penelitian jenis ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. (Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, pada penelitian ini, subjek penelitian meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Badan Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Dinas Kepolisian Perairan Kabupaten Bantul dan termasuk didalamnya pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok.

Sedangkan objek penelitian merupakan objek yang dijadikan titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian meliputi peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di DIY khususnya TPI Depok dalam mengembangkan dan mendukung pertahanan kawasan pesisir di DIY.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan merupakan angka-angka melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. (Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif, 124). Adapun data kualitatif ini meliputi:

- a. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian;
- b. Data lain yang bukan merupakan angka.

Adapun sumber-sumber data bukan angka yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer yang akan penulis gunakan adalah wawancara. Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai peneliti untuk penelitian ini:

Tabel 3.1
Daftar Narasumber Dalam Penelitian

No	Instansi
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Yogyakarta
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
4	Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul
5	Dinas Kepolisian Perairan Kabupaten Bantul
6	Pengurus TPI Depok

Dinas-Dinas tersebut dipilih peneliti karena dianggap memiliki otoritas dan kapasitas sebagai pengambil keputusan dan kewenangan sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban yang jelas dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Namun peneliti juga akan menerima nama-nama narasumber lain yang ditunjuk oleh nama-nama yang ada di tabel tersebut yang juga memiliki otoritas dan kapasitas untuk diwawancarai, jika narasumber yang terdaftar tidak dalam kondisi bisa diwawancarai.

b. Data sekunder

Data sekunder yang akan penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, literatur, dan dokumen-dokumen kebijakan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Menurut Elizabeth dalam (Ardianto, 2011: 165), Observasi merupakan kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera. Kegiatan observasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk memahami lingkungan. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dalam proses pemilihan dinas atau instansi yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Tempat Pelelangan Ikan yang dapat mewakili TPI di DIY.

b. Wawancara

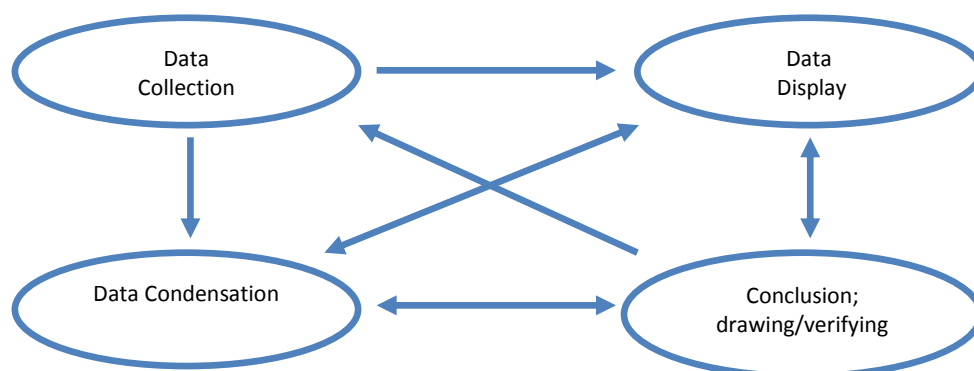
Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada informan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan Depok serta dinas yang memiliki hubungan dengan pengembangan kawasan pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahap ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka agar tidak kaku dan dapat diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih luwes, maka wawancara dilakukan secara tidak terstruktur namun tetap terfokus pada inti masalah yang sedang diteliti, yaitu melihat bagaimana perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari TPI yang ada di DIY khususnya di TPI Depok. Proses wawancara ini juga menggunakan sarana telepon, sms atau *email* untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.

c. Dokumen.

yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan dapat berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, *et al* (2014), yang disebut dengan analisa data model interaktif, yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verifying*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif.



Gambar 3.1 *Components of Data Analysis: Interactive Model*

Sumber: Matthew B. Miles, *et al.*, *Qualitative Data Analysis*, 2014:33

Langkah pertama adalah kondensasi data, yaitu sebuah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang didapat dari proses wawancara di beberapa Dinas pemerintahan Provinsi Yogyakarta, dan dari data berupa transkrip, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini untuk memperkuat data yang dimiliki (Miles dan Huberman, 2014). Pada gambar di bawah, terdapat dua bentuk penyajian data, dimana data dapat melalui kondensasi setelah dikumpulkan, namun dapat langsung di tunjukkan setelah data dikumpulkan. Langkah kedua adalah penyajian data, dimana setelah memperoleh data, kemudian data-data tersebut disajikan dengan cara yang terorganisir yang kemudian diolah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan sebagai hasil akhirnya (Miles dan Huberman, 2014). Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dimana tahapan ini merupakan proses menyimpulkan dari apa yang sudah dianalisa, sedangkan verifikasi dibutuhkan untuk mengelaborasi

beragam argumentasi maupun pendapat para ahli guna membangun konsensus yang intersubjektif (Miles dan Huberman, 2014).

Tahapan penelitian setelah pengumpulan dan pengolahan data adalah analisis, yaitu suatu proses untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Analisis disini menggunakan analisis dari peran TPI dan juga pada analisis ini akan dipelajari seluruh segmen dalam lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara yang berisikan pertanyaan kunci untuk mengetahui *Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)* menggunakan metoda analisis kualitatif deskriptif. Sesuai dengan sasaran penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran fungsi pemberdayaan, pelabuhan, pemasaran dan sebagai regulator serta pengawas dalam mengembangkan kawasan pesisir.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok berdasarkan fungsi–fungsi manajemen Handoko (1985), yang mana berdasarkan teorinya ini membagi fungsi-fungsi manajemen menjadi empat fungsi, yaitu: perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi planning adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan dan target.
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut.
- 3) Menentukan sumberdaya yang diperlukan.
- 4) Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Mengacu fungsi *planning* tersebut, maka peneliti melihat bagaimana perencanaan yang diterapkan di Tempat Pelelangan Ikan Depok untuk melihat tujuan dan target yang ingin dicapai serta bagaimana strategi dalam menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan dan masyarakat kawasan sekitar.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian berfungsi menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang akan dipadukan atau diintegrasikan sedemikian rupa sehingga terjalin suatu hubungan secara keseluruhan. Dari sini, peneliti ingin melihat struktur organisasi dari kedua TPI tersebut dan bagaimana struktur tersebut dijalankan.

c. Pengarahan

Pengarahan atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bias dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk bagaimana TPI ini di pimpin dan dijalankan guna mencapai tujuan dari TPI ini sendiri.

d. Pengawasan

Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target.

3.6 Prosedur Penelitian

3.6.1 Instrumen Penelitian

Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara. Panduan tersebut diperlukan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna mendapatkan jawaban yang tepat dan jelas terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, tujuan lainnya adalah guna menentukan target narasumber yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti.

3.6.2 Pengujian dan Keterandalan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah ditentukan oleh peneliti. Peneliti juga akan menunjukkan bukti bahwa telah melakukan wawancara dengan para narasumber, baik yang berupa surat keterangan, foto dengan narasumber, maupun transkrip wawancara yang juga akan dilampirkan pada bagian akhir penelitian ini. Pihak yang ingin menguji keterandalan data tersebut dapat mengecek secara langsung ke narasumber-narasumber yang bersangkutan untuk membuktikan benar atau tidaknya peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

Pengujian dan keterandalan data penelitian ini dilakukan dengan proses triangulasi. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372), pengecekan data dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan melihat bagaimana pengumpulan data dan waktu. Dari sini, triangulasi dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan triangulasi sumber agar dapat menangkap masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian.

Selanjutnya, pendekatan triangulasi dilakukan menurut:

- a. Sudut pandang dari Pemerintah Provinsi Yogyakarta dan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang membuat dan menjalankan kebijakan dan regulator dari Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Sudut pandang Pengelola Tempat Pelelangan Ikan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kawasan pesisir; dan
- c. Sudut pandang Nelayan sebagai pihak yang menjalankan regulasi serta kebijakan kawasan pesisir dalam mengembangkan kawasan pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan yang berlokasi pada sejumlah tempat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya terutama di Kabupaten Bantul, seperti:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Yogyakarta
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- d. Badan Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul
- e. Dinas Kepolisian Perairan Kabupaten Bantul
- f. Pengurus TPI Depok
- g. Tokoh Masyarakat dan Nelayan

Proses bimbingan teknis dengan dosen pembimbing dilakukan sepanjang proses penyusunan tesis ini berlangsung dan rencana jadwal penelitian ini telah disesuaikan dengan dinamika jadwal pendidikan yang ada di Universitas Pertahanan Indonesia, Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Keamanan Maritim Cohort 3. Berikut akan kami lampirkan jadwal penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dalam penyusunan tesis ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2016				2017		
		Sep	Okt	Nov	Des	Feb	Mar	Sep
1	Persiapan Proposal							
2	Perbaikan Proposal							
3	Sidang Ujian Proposal							
4	Perbaikan Proposal							
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data							
6	Penyusunan Tesis							
7	Sidang Ujian Tesis							
8	Perbaikan Tesis							

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

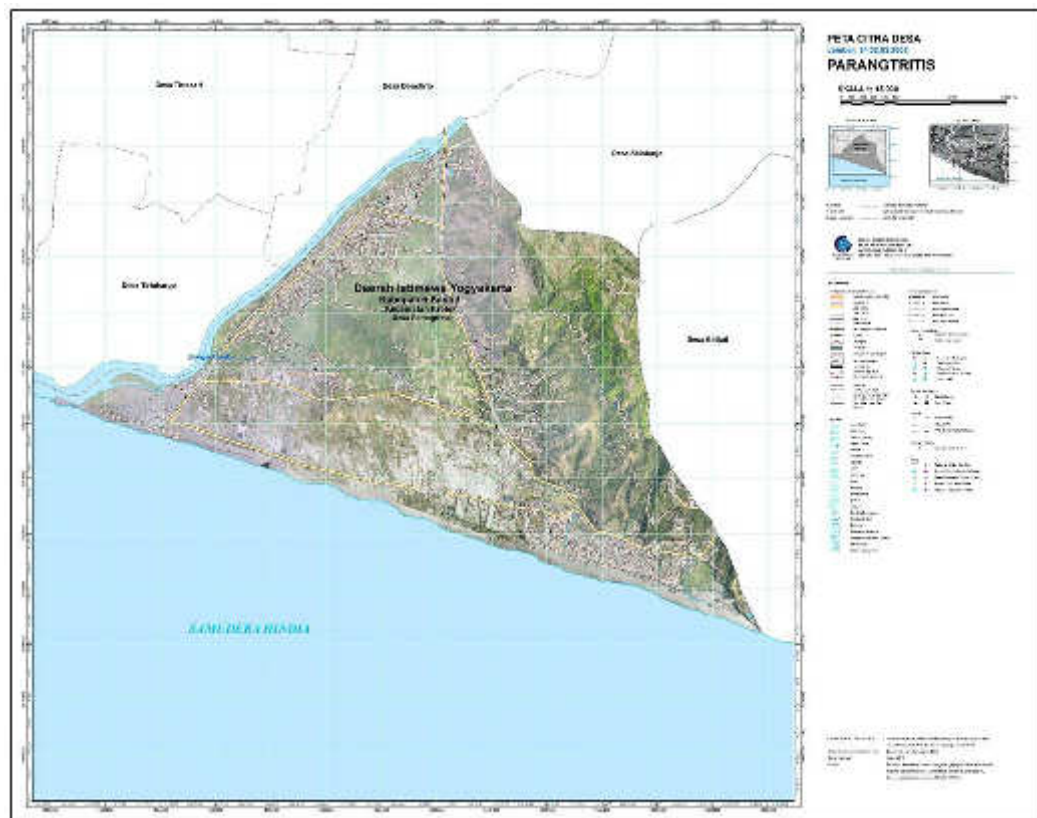
4.1 Gambaran Umum TPI

4.1.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok berada dalam rangkaian wilayah Pantai Selatan di Kabupaten Bantul. Dalam administratif pemerintahan, TPI Depok terletak di wilayah Pantai Depok yang juga masih satu kompleks dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Pantai Depok letaknya berada di daerah selatan Pulau Jawa, sehingga sering dikatakan Pantai Laut Selatan begitu juga dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Adapun wilayah Pantai Depok berada dalam Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah desa sebesar 11,87 Km². Jarak antara Desa Parangtritis dengan ibukota Kecamatan Kretek sekitar 2 km dan dapat ditempuh dalam waktu sepuluh menit. Sedangkan dengan jarak dengan ibukota Kabupaten Bantul berjarak 16 km dengan waktu tempuh 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor yang umum digunakan oleh masyarakat di desa tersebut.

Secara geografis Desa Parangtritis terletak pada bujur (*Longitude*) adalah 110°19'10" dan Lintang (*Latitude*) adalah 7°59'37". Adapun untuk batas-batas wilayah Desa Parangtritis (gambar 4.1) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Donotirto
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tirtoharjo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Seloharjo atau
Desa Girijati



Gambar 4.1 Peta Citra Desa Parangtritis

Sumber: desa.parangtritis@bantulkab.go.id

Topografi Desa Parangtritis terdiri dari dataran (88,59%) dan perbukitan sampai pegunungan (11,41%). Sedangkan ketinggian tanah dari permukaan laut adalah sampai dengan 56 m, dengan suhu minimum 25 derajat celcius dan suhu maksimum 32 derajat celcius, dengan curah hujan tertinggi pada bulan April 2015 yaitu 963 mm per tahun yang tercatat pada stasiun pemantau curah hujan Gedongan.

Kondisi *hidrologi* atau perairan di Desa Parangtritis termasuk dalam kategori baik karena curah hujan lumayan tinggi, sehingga aliran air permukaan serta aliran air tanah cukup baik dan mampu mengairi ladang pertanian warga desa yang bertani ketika sedang tidak melaut, dan untuk ketersediaan air bersih di Desa Parangtritis ini juga cukup baik. Untuk kondisi *oceanografi* seperti arus gelombang di desa Parangtritis ini terhitung dalam kategori kurang aman karena tidak adanya penghalang yang berfungsi sebagai pelindung dan pemecah gelombang sebelum memasuki desa Parangtritis, untuk padang dan gelombang tertinggi di

desa ini biasanya terjadi antara pertengahan sampai akhir bulan sekitar 18-20 setiap bulannya. Untuk kondisi di daerah pantai Depok ini sendiri memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 2-15%. Pantai Depok memiliki luas kurang lebih 25 ha, fasilitas yang diberikan cukup banyak selain terdapat Tempat Pelelangan Ikan juga terdapat pasar ikan sehingga para pengunjung dapat membeli ikan yang masih *fresh*, dan disana juga banyak tersedia rumah makan yang dapat memanjakan para pengunjung dengan sajian kuliner dengan ikan segarnya.

4.1.2 Kependudukan dan Mata Pencaharian.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2015, jumlah penduduk desa Parangtritis terdiri dari 8.303 jiwa dengan rincian 3.963 jiwa laki-laki dan 4.340 jiwa perempuan (lihat tabel 4.1). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Parangtritis terdiri dari 6 (enam) tingkatan usia, yaitu mulai tahun yang terendah adalah usia 0-4 tahun sampai yang terakhir adalah tingkat usia lebih dari 60 tahun. Tingkatan usia tersebut menunjukkan keberagaman penduduk mulai dari usia produktif dan tidak produktif. Selanjutnya juga dibedakan mengenai gender laki-laki dan perempuan beserta jumlahnya pada masing-masing tingkatan usia. Terlihat bahwa jumlah perempuan lebih besar dari pada jumlah laki-laki, ketika pada tingkatan usia 20-59 penduduk perempuan lebih dominan. Penduduk dengan tingkatan usia 20-59 tahun memiliki kedudukan tingkat usia yang terbesar baik dari segi jumlah maupun prosentase. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat penduduk yang produktif dan banyaknya sumber daya manusia yang siap untuk bekerja.

Seperti terlihat dari data pada tabel 4.1 di bawah nampak tingkatan penduduk usia produktif pada usia 20-59 tahun di Desa Parangtritis lebih besar dan dominan dan hal ini merupakan modal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tabel 4.1 Jumlah Prosentase Penduduk Desa Parangtritis

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4 Tahun	277	284	561	6,76%
2	5-9 Tahun	318	275	593	7,14%
3	10-14 Tahun	298	295	593	7,14%
4	15-19 Tahun	257	245	502	6,05%
5	20-59 Tahun	2273	2495	4768	57,42%
6	>60 Tahun	540	746	1286	15,49%
	Jumlah Total	3.963	4.340	8.303	

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2016

Mata pencaharian utama penduduk Desa Parangtritis yang dominan adalah terletak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sebagian pada sektor pariwisata, perdagangan, transportasi dan jasa. Pada sektor pertanian, komoditas tanaman petani daerah Parangtritis antara lain padi, cabai, bawang merah dan tanaman palawija dan untuk kegiatan di sektor perikanan antara lain budidaya ikan tawar, tambak udang, nelayan dan pengolahan ikan. Pada sektor peternakan menjadi salah satu komponen pendukung ekonomi masyarakat Parangtritis, karena rata-rata setiap keluarga memiliki salah satu hewan ternak baik sejenis unggas, kambing maupun sapi, dan ini merupakan menjadi hasil tambahan masyarakat ketika pada saat tidak melaut atau tidak sedang musim ikan..

Pada bidang sektor pariwisata di Desa Parangtritis semakin berkembang karena mempunyai banyak tempat wisata seperti kawasan kuliner Pantai Depok, Pantai Parangtritis, laguna Depok, Pantai Cemara Sewu dan masih banyak lagi. Untuk sektor pariwisata tidak terlepas dari sektor perdagangan dan jasa. Ketiga sektor ini saling mendukung untuk menciptakan tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan. Beberapa contoh kegiatan masyarakat di bidang jasa pariwisata adalah penyewaan ATV di Pantai Depok dan Pantai Parangtritis. Pantai Depok pengunjung juga dapat langsung membeli ikan dan dimasak ditempat karena banyak

terdapat rumah makan yang menyediakan jasa pengolahan ikan yang baru dibeli dan ingin segera disantap disana.

4.1.3 Struktur dan Prasarana Sosial

Perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi di Desa Parangtritis mulai dilakukan pada tahun 1980. Jaringan jalan utama dan penghubung sebelumnya hanya berupa batu dan material tanah mulai diaspal. Pada tahun 1989 dibangun jembatan melintasi Sungai Opak yang menghubungkan antara Desa Parangtritis dan Desa Donotirto. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Kretek. Hambatan dari sarana transportasi telah hilang, Desa Parangtritis sudah dapat diakses dengan mudah. Sejak saat itu Desa Parangtritis mulai berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Tempat wisata yang mulai dikenal adalah Pantai Depok. Pantai Depok mulai diresmikan tahun 1998. Perkembangan ekonomi warga di sekitar Pantai Depok mulai meningkat. Dusun Depok mampu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dusun yang lain.

Infrastruktur irigasi Desa Parangtritis belum cukup baik. Kondisi ini berpengaruh pada hasil produksi pertanian yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Pada musim kemarau petani sulit mendapatkan air, sedangkan pada musim penghujan sering terjadi banjir di area wilayah persawahan karena saluran pembuangan yang belum optimal. Untuk sarana komunikasi, internet maupun jaringan telepon sudah terjangkau oleh penduduk Desa Parangtritis. Desa Parangtritis mengelola sarana komunikasi dan jaringan listrik dengan baik didukung dengan adanya menara telekomunikasi sebanyak 7 buah dan Kantor PLN berada di wilayah Parangtritis.

Infrastruktur di bidang transportasi di Desa Parangtritis mempunyai 2 terminal yang berada di Dusun Mancingan. Terminal lama difungsikan dengan baik yaitu untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang jalur Jogja-Parangtritis, sedangkan terminal baru sebagai tempat pemberhentian bus pariwisata.

4.1.4 Profil Tempat Pelelangan Ikan Depok

Tempat Pelelangan Ikan Depok berlokasi di sekitar pantai Depok yang juga masih termasuk ke dalam kompleks pantai laut selatan selain Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok berdiri sejak tahun 1998 yang diberi nama dengan Mina Bahari Empat Lima. Nama tersebut terdiri dari dua makna yang berbeda, Mina Bahari berarti ikan dilaut sedangkan Empat Lima sendiri diambil dari nama dusun/desa Parangtritis yaitu Bungkus dan Depok, Bungkus merupakan dusun nomor empat dan Depok adalah dusun nomor lima, sehingga masyarakat setempat sepakat untuk menamai TPI yang berada di Pantai Depok ini dengan nama TPI Mina Bahari Empat Lima Depok Kretek Bantul Yogyakarta yang mayoritas anggotanya merupakan penduduk dari dusun Bungkus dan Depok.

Tujuan didirikannya TPI Depok adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu para nelayan untuk menjual ikan-ikan hasil tangkapannya. Masyarakat disekitar TPI Depok sendiri tidak bekerja sebagai nelayan sepenuhnya, terutama bagi kaum wanita. Pada umumnya, para nelayan adalah laki-laki, sedangkan penduduk wanita menjadi pedagang makanan dan membuka tempat makan yang menyediakan jasa pengolahan ikan yang baru dibeli dan ingin segera disantap di Pantai Depok. Pemerintah sendiri mendukung dengan membangun beberapa infrastruktur seperti pasar, kemudian fasilitas pendukung lainnya.

Menurut salah seorang pengurus TPI Depok, anggota TPI Depok seluruhnya merupakan penduduk dari dusun Depok dan Bungkus, namun untuk nelayan tidak semuanya berasal dari warga sekitar Pantai Depok, ada yang berasal dari luar daerah ini seperti Cilacap. Nelayan yang berasal dari daerah Depok secara otomatis akan masuk sebagai anggota TPI Mina Bahari Empat Lima, sedangkan nelayan pendatang atau nelayan Andon bukan merupakan anggota tetap, karena mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak menetap di Pantai Depok. Nelayan ini biasanya

datang pada saat ada musim ikan saja dan apabila sudah tidak musim, mereka akan berpindah tempat lagi.

Selain untuk melaut, para anggota TPI Mina Bahari Empat Lima atau TPI Depok juga memiliki kegiatan rutin yang selalu diadakan di tiap bulannya, seperti arisan. Biasanya arisan ini dilaksanakan setiap 35 hari sekali atau jaraknya biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan *sakpasaran dino* yang bertepatan dengan hari senin *pond an* diadakan bergiliran dari satu rumah anggota ke rumah anggota lain di tiap bulannya. Menurut ketua TPI Depok, acara rutin ini diadakan agar para nelayan dapat berkumpul di tiap bulannya selain untuk bersilaturahmi, para anggota juga dapat mengutarakan ide gagasan atau keluhan kesahnya bahkan protes sekalipun pada saat diadakan acara arisan ini.

TPI Depok memiliki struktur kepengurusan untuk mendukung setiap kegiatan yang dijalankan agar dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah gambar susunan struktur organisasi dari TPI Mina Bahari Empat Lima atau TPI Depok:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi TPI Mina Bahari Empat Lima
sumber: TPI Mina Bahari Empat Lima

Berikut ini struktur kepengurusan dari TPI Mina Bahari Empat Lima atau TPI Depok yaitu:

Pelindung : 1. Lurah Desa Parangtritis
2. BPD Dukuh Depok
3. Dukuh Bungkus

Penasehat : Bapak Topo

Ketua I : Sarjuno

Ketua II : Daryono
HP : 087738447599

Sekretaris I : Tarmanto
HP:087839956878/
087738265112

Sekretaris II : Kuswadi

Bendahara I : Wadiman

Bendahara II : Sukoco

Seksi Penimbang : Karmanto

Seksi Pelelangan : 1. Triwiyanto
2. Eko Murtoyo

Seksi Pembantu : 1. Mulyadi
2. Sudardi

Seksi Lingkungan : 1. Surono
2. Koseri
3. Giyono
4. Winardi
5. Karmanto

Seksi Keamanan : 1. Suwarji
2. Tugiran
3. Riyadi
4. Ediyanto

4.1.5 Potensi Perikanan

Daerah Pantai Depok memiliki potensi ikan yang sangat besar. Ikan yang dihasilkan dari laut sekitar Pantai Depok sangatlah beragam. Bawal, tenggiri, jahan, tombol, hiu, teri, pari, udang, kakap, tongkol, dan banyak jenis ikannya. Namun, hasil tangkapan ikan yang paling besar di Pantai Depok adalah ikan layur. Hal ini sesuai dengan hasil pencatatan TPI Depok di tahun 2015. Akan tetapi menurut di tahun 2016.

BULAN	JENIS IKAN													JUMLAH	
	BP	BH	TENGGERI	LAYUR	JAHAN	TOMBOL	HIU	TERI	PARI	UDANG	KAKAP	TONGKOL	LAIN2	KG	TRIP
JAN	3.715,80	2.10	75.20	1.240,90	1.466,60	312,10	414,10	324,20	145,90	7,60	426,60	40,20	66,90	8.237,65	183
FEB	3.750,80	4,30	88,80	908,30	439,20	351,40	104,90	96,50	197,20	33,90	114,50	33,90	45,20	6.190,80	616
MAR	2.581,60	3,80	47,00	412,80	2.708,80	367,20	5,20	101,50	218,10	36,65	62,10	78,50	95,90	6.239,65	408
APR	332,55	2,50	75,60	6.689,50	842,50	735,50	83,40	1.933,50	177,80	137,90	322,60	67,40	40,20	11.170,25	423
MAY	402,25	0,00	70,00	6.768,80	305,30	2.572,60	0,00	1.743,50	167,20	233,20	27,10	68,50	97,90	12.516,35	314
JUN	1,80	0,00	1,90	260,30	10,00	5,60	0,00	10,00	211,30	266,55	71,90	175,60	1.870,50	2.633,95	107
JUL	0,63	0,00	16,00	2.399,00	84,60	158,80	0,00	66,50	32,00	294,70	90,80	278,00	250,00	4.671,10	248
AUG	0,60	0,00	27,40	475,40	93,20	204,50	0,00	366,00	229,50	705,90	298,70	723,90	33,60	3.333,70	334
SEP	6,80	0,00	58,50	1.409,20	67,20	303,20	229,10	275,50	233,70	164,75	110,90	2.574,50	36,40	5.470,05	218
OCT	2.491,00	0,50	166,00	8.998,90	1.111,80	2.242,90	816,10	459,10	271,40	38,40	51,20	1.931,80	320,40	18.899,50	471
NOV	758,25	0,00	254,10	8.084,60	962,50	5.148,30	839,40	2.865,30	31,40	2,10	29,40	3.371,60	54,30	24.431,35	522
DEC	1.116,95	0,00	33,90	1.836,60	312,60	281,20	87,20	521,20	303,20	341,04	15.005,50	79,40	17,50	19.735,29	587
JML	18.198,95	13,20	913,40	39.984,30	7.644,20	12.684,30	2.579,40	8.747,50	2.899,60	2.262,10	16.610,20	11.374,10	3.230,10	123.864,40	4.981
target	160.000	30.000	25.000	20.000	6.000	5.000	14.000	1.500	15.000	250.000	20.000	5.000	10.000		

BULAN	JENIS IKAN													JUMLAH	
	BH	BH	TGR	LAYUR	JAHAN	TOMBOL	HIU	TERI	PARI	UDANG	KAKAP	TONGKOL	LAIN2	TRIP	(Kg)
JANUARI	3.052	-	27,7	471,6	105,7	74	109,7	50,5	34,3	346,25	149,9	17,8	49,1	725	11.488,35
PEBRUARI	1.618,2	0,6	79,8	642,8	559,2	401,4	56,7	108,7	32,7	25,8	1.359,9	5,1	13,2	599	5.069,1
MARET	1.023,15	12,9	109,9	7.601,8	1.181,9	309,8	132,2	149,8	154,6	210,6	438,6	9,7	220,8	544	10.517,95
APRIL	208,7	0,3	6,7	2.082,7	251,2	201,6	-	68,2	35,2	1.089,9	11,8	44,5	74	488	5.102,8
MAY	6,76	1,5	-	1.271	66,5	105	-	324	91,7	268,25	32,8	-	39,5	230	2.809,25
JUNI	27,85	-	50,6	2.325,2	30,8	648,2	-	3.844	2,9	628,05	12,7	10,3	464,2	333	8.156,1
JULI	92,9	-	4,7	190,5	98	2,3	-	36	20	235,55	30,5	4	35,5	131	820,55
AGUSTUS	-	-	-	-	217,3	-	173,2	-	61,2	38,3	274,6	-	200,2	63	1.084,5
SEPTEMBER	26,6	-	-	2.668	-	57,8	4	251	11,95	160,1	11	188,9	10,7	4.813,65	
OKTOBER	42,15	-	6	7	5.801,7	21	108,5	102	474	2,9	3.204,7	45,2	368,9	262	10.086,0
NOPEMBER	23,7	-	96,1	4,9	5744,8	40,9	282	55	382,2	7,9	4.319,7	44,7	273,8	351	11.911,7
SEMBER	20,35	-	44,7	1,5	1.272,6	41,7	277,7	103	34,5	86,85	574,7	11,6	42,2	126	2.833,2
MLAH															

Gambar 4.3 Hasil Tangkapan Ikan di tahun 2015 dan 2016.
sumber : TPI Mina Bahari Empat Lima

Dilihat dari tingginya potensi perikanan tangkap di daerah pantai Depok diatas tentunya perlu adanya peningkatan dari segi pengelolaan yang baik secara optimal dan juga sarana-prasarana serta infrastruktur yang cukup memadai untuk meningkatkan produktivitas dan beberapa komoditas ikan tersebut tanpa perlu merusak lingkungan serta dapat berkelanjutan produktivitasnya

4.1.6 Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dan menggantungkan mata pencahariannya dari hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Jadi dapat dikatakan bahwa nelayan merupakan kelompok orang yang bermata pencaharian dari hasil laut dan tinggal di desa-desa yang dekat dengan laut atau pesisir (sastrawidjaya. 2002:45)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1985, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Adapun penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa nelayan merupakan masyarakat yang mengandalkan hasil laut sebagai mata pencahariannya dengan melakukan penangkapan ikan di suatu perairan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nelayan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu homogen dan heterogen. Nelayan homogen biasanya nelayan yang bermukim di desa-desa terpencil dan biasanya menggunakan alat tangkap sederhana dan tradisional dan secara produktivitas masih kecil, sedangkan nelayan heterogen pada umumnya tinggal di tempat yang mudah dijangkau dengan kendaraan darat sekalipun. Hal ini dapat menimbulkan efek berupa hasil yang didapat oleh kelompok nelayan tersebut yang dapat

dikarenakan beberapa hal pendukung yang membedakan kedua kelompok nelayan tersebut. (sastrawidjaya. 2002: 56-58).

4.1.7 Perkembangan TPI Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul

Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki panjang pantai kurang lebih 17 km yang meliputi tiga kecamatan pesisir yaitu Srandakan, Sanden dan Kretek dan juga memiliki 11 desa pesisir. Dengan panjang pantai tersebut, Kabupaten Bantul juga memiliki enam Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar sepanjang pantai Kabupaten Bantul, berikut ini tabel dari TPI yang ada di Kabupaten Bantul beserta dengan cakupan wilayahnya :

Tabel 4.2 Nama TPI yang ada di Kab. Bantul

NO	Nama TPI	Alamat
1	TPI Depok	Depok, Parangtritis, Kretek
2	TPI Mancingan	Mancingan, Parangtritis, Kretek
3	TPI Samas	Samas, Srigading, Sanden
4	TPI Patihan	Patihan, Gadingsari, Sanden
5	TPI Kuwaru	Kuwaru, Poncosari, Srandakan
6	TPI Pandansimo	Ngentak, Poncosari, Srandakan

sumber: dinas pemerintah Kab. Bantul

Tempat Pelelangan Ikan atau TPI jika ditinjau dari manajemen operasi dapat diartikan sebagai tempat penjual jasa yang didalamnya mencakup sebagai tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin kapal dan lain sebagainya. Dengan luas wilayah pantai tersebut, sepatutnya harus ada pintu yang menjembatani antara para nelayan yang ingin menjual hasil tangkapannya dengan harga yang

pantas dan kepada para pembeli juga bisa menawar dengan harga yang sesuai sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

TPI yang ada diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya dan sebagai tempat untuk mempersiapkan kegiatan untuk menangkap ikan selanjutnya. Secara fungsional, TPI juga bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dan ketersediaan ikan bagi masyarakat terutama penduduk sekitar dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar.

Bagi masyarakat sekitar, kondisi ini sangat membantu karena sejauh ini telah terjadi pergeseran mata pencaharian dari petani ke nelayan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti penyempitan lahan pertanian, sifat usaha pertanian yang musiman, dan ketidak pastian dalam usaha pertanian karena beberapa faktor seperti gagal panen, hama, kekeringan, banjir dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir mulai beralih profesi dari petani menjadi nelayan. Tercatat di tahun 2012 terdapat 175 masyarakat yang menjadi nelayan di sepanjang wilayah Pantai Depok.

4.1.8 Transformasi Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Pantai Depok

Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Depok, menjadi nelayan dan bergantung pada hasil sumber daya laut merupakan pilihan yang cukup rasional, sehingga transformasi mata pencaharian dari petani menjadi nelayan diambil oleh masyarakat walaupun sebagian masih ada yang tetap bergerak di bidang pertanian dan bidang lainnya, namun ini relatif sedikit. Transformasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya:

a. Faktor Internal

- 1) Kondisi Ekologis di daerah Pantai Depok yang merupakan daerah pinggiran pantai dengan porositas yang tinggi, sehingga jenis tanaman yang bisa di tanam disana adalah tanaman yang tahan akan porositas tinggi. Selain itu permasalahan irigasi juga menjadi

faktor yang sangat membutuhkan perhatian, karena pada saat musim kemarau, para petani bergantung pada pompa sumur dan jika musim penghujan, lahan pertanian banyak yang dilanda banjir.

- 2) Lahan yang sempit sehingga hasil yang didapat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari para petani.
- 3) Tuntutan ekonomi dimana kebutuhan sandang, pangan dan papan yang semakin mahal.
- 4) Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir di sekitaran Pantai Depok yang menjadikan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah dan gambaran yang sempit mengenai pekerjaan yang ada. Selain itu banyak yang berpandangan bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi nelayan.
- 5) Komunitas jaring eret atau aktivitas masyarakat sejak lama yaitu menebar jaring di sepanjang pantai yang nantinya akan ditarik untuk diambil hasilnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari masyarakat berfikir untuk menggunakan perahu karena hasil yang didapat dari aktivitas jaring eret ini sangat terbatas.

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya Nelayan Andon (pendatang), karena kegiatan melaut bagi masyarakat sekitar Pantai Depok masih relatif baru dilakukan dan digiatkan pada tahun 1998.
- 2) Mulai dilirik pemerintah, sejak tahun 2000, pemerintah terus mengupayakan dan mengajak berbagai dinas terkait untuk memperhatikan potensi wilayah pesisir. Beberapa kali pemerintah membuat program baik berupa hibah maupun pinjaman lunak untuk pengembangan kawasan Pantai Depok.
- 3) Berkembangnya sektor pariwisata juga turut andil dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nelayan. Disisi lain, masyarakat juga cenderung bisa bekerja dengan keluarganya, dimana suami atau pihak laki-laki mencari ikan di laut sedangkan istri atau pihak perempuan menjual ikan dan menjual jasa

pengolahan ikan yang baru saja ditangkap untuk diolah dan disajikan di waktu yang sama.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran TPI Depok di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir

Secara teoritis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan (kartodirdjo, Sartono: 1993) sedangkan dari makna yang luas, masyarakat pesisir dapat pula diartikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi pemindahan lain.

Secara umum, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara langsung. Mereka terdiri dari nelayan baik pemilik dan buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. (Kartodirdjo, Sartono. 1993). Menurut Sutarno, 1999, masyarakat pesisir juga termasuk bagi mereka yang bergerak dibidang non-perikanan. Seperti para penjual jasa transportasi. Namun pada umumnya, masyarakat pesisir identik dengan nelayan karena nelayan merupakan masyarakat yang tinggal dan kehidupan perekonomiannya bergantung pada hasil sumber daya laut secara langsung.

Di daerah Pantai Depok, nelayan digolongkan menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis pekerjaannya dan berdasarkan statusnya. Nelayan berdasarkan jenis pekerjaannya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nelayan darat dan nelayan laut. Nelayan darat adalah orang yang bertugas mendorong dan menarik kapal, maksudnya adalah mendorong kapal jika

ada kapal yang akan pergi melaut dan menarik kapal jika ada kapal yang akan menepi ke pantai. Sedangkan nelayan laut adalah orang yang menangkap ikan dilaut. Yang selanjutnya adalah kelompok nelayan berdasarkan statusnya. Nelayan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nelayan tetap dan nelayan andon. Nelayan tetap adalah orang-orang asli Depok yang menjadi nelayan di Pantai Depok, nelayan tetap inilah yang biasanya menjadi nelayan darat saat tidak musim ikan, tetapi saat musim ikan mereka juga menjadi nelayan laut dan nelayan darat. Sedangkan nelayan Andon adalah nelayan yang berasal dari luar Pantai Depok dan melaut disana.

Nelayan pantai Depok disatukan sebuah organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari ini memfasilitasi para nelayan dalam penjualan atau pemasaran ikan yang ada. Tidak hanya dalam pemasaran TPI ini juga bergerak dalam sektor penangkapan dan pengolahan laut. TPI Mina Bahari ini adalah organisasi koperasi nelayan sekaligus sebagai tempat pelelangan ikan di pantai Depok.

Potensi hasil laut di wilayah pesisir laut Jawa masih sangat melimpah terutama di wilayah Pantai Depok. Potensi di pantai ini baru mulai digali ditahun 1998 sejak ada krisis moneter melanda Indonesia. Keberadaan nelayan ini didesak kebutuhan ekonomi yang semakin beragam dan mendesak, namun, hasil pertanian yang masih belum jelas masa panennya membuat masyarakat beralih menjadi nelayan. Sampai saat ini, potensi kelautan di wilayah Pantai Depok sudah digali selama hampir 20 tahun.

Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Sehingga peran dari TPI ini sangatlah signifikan guna menciptakan kondisi pasar yang saling menguntungkan baik untuk pihak nelayan, masyarakat penyedia jasa di sekitar TPI dan juga bagi para pembeli yang datang baik yang khusus membeli ikan atau yang ingin berekreasi di sekitaran lokasi Pantai Depok dan pantai sekitarnya.

Tabel 4.3 Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Nelayan dan KUB, dan Sarpras Lainnya Tahun 2012-2013

No	Uraian	Jumlah	
		2012	2013
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.150, 498	1.202,137
2	Jumlah Nelayan (orang)	504	537
3	Jumlah KUB (Kelompok)	24	29
4	Perahu Motor Tempel	89	112
5	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	5

Sumber: <https://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Bantul.html>

Aktivitas nelayan dapat dilihat dari mulai mempersiapkan jaring dan perahu untuk melaut. Pada siang hari dapat dilihat perjuangan nelayan melawan deras dan tingginya ombak pantai selatan untuk menurunkan perahunya ke laut. Tidak mudah mereka bisa menembus ombak dan bahkan kadang-kadang harus mengurungkan niatnya jika kondisi ombak tidak bersahabat untuk melaut. Untuk mendapatkan tangkapan ikan yang cukup bisa memerlukan waktu 12-24 jam. Para nelayan tersebut kembali mendarat pada waktu malam menjelang pagi meskipun ada sebagian yang mendarat di waktu siang hari.

Kegiatan pengelolaan perikanan yang saat ini dijalankan tidak hanya berkonsentrasi pada aktivitas perikanan saja, tetapi juga aktivitas pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan tempat pelelangan ikan. Setiap kegiatan pasti memiliki target yang ingin dicapai, khusus dalam penelitian ini adalah dari pemerintah baik Dinas provinsi maupun kabupaten, nelayan, dan juga masyarakat. Target tersebut digunakan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan, beberapa program kegiatan telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa analisis terkait peran dari TPI Depok dalam mengembangkan wilayah pesisir Pantai Depok, diantaranya:

- a. Pendapatan nelayan, dimana dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Depok telah menjadikan pergeseran pola penjualan ikan yang bersifat tradisional atau pasar krumunan yang dijual langsung dari nelayan menjadi lebih terpusat, perubahan pola penjualan tersebut menjadikan harga ikan semakin baik. Pendapatan nelayan dapat naik walaupun hasil tangkapan mereka sedikit karena harga jual yang lebih baik dan merata. Hal ini dibenarkan oleh pengurus dari TPI Depok dan juga masyarakat sebagai nelayan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi akan adanya TPI karena tidak hanya mawadahi, namun TPI juga menjadi regulator bagi para nelayan, TPI juga berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait seperti Polisi Air dan Angkatan Laut dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan dari para nelayan.

Selain itu, apabila ikan yang di jual di TPI ini tidak lekas laku, maka ikan akan segera di pasarkan ke TPI yg berada di cilacap, hal ini dilakukan agar para nelayan tidak merugi. 50% hasil tangkapan nelayan dikirim keluar DIY. Bahkan belum lama ini ada juga yang di ekspor ke china melalui perantara di Jakarta. Selain memasok ke TPI di Cilacap, hasil tangkapan nelayan juga di pasok ke berbagai daerah diantaranya Jakarta, Kediri, Semarang.

- b. Pendidikan, banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan dan sekolah merupakan infestasi jangka panjang bagi anak-anak nelayan anggota TPI Mina Bahari Empat Lima atau TPI Depok. Sejauh ini, TPI sudah menjalankan perannya dengan baik, dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Pantai Depok. Untuk para nelayan sendiri, TPI bekerjasama dengan Dinas terkait untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan serta memberikan bantuan kepada para nelayan. Jangka waktu pembinaan ini adalah 2 bulan sekali, sedangkan untuk bantuan itu tidak menentu waktu pemberiannya.

Jenis program yang diberikan itu berupa pembinaan dan pelatihan dengan mendatangkan para pakar dan ahli di bidangnya seperti

dalam hal menangkap ikan, kemudian menjalankan dan merawat kapal serta mesinnya, kemudian dari segi keselamatan pada saat melaut.

- c. Kesehatan, Dalam hal kesehatan, dengan mutu lingkungan yang makin membaik maka tingkat kesehatan masyarakat nelayan pun meningkat pula. Keadaan kesehatan masyarakat nelayan di pantai depok sangat erat dengan pola hidup nelayan. Rumah-rumah nelayan yang dahulu sebagian besar sangat kumuh menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat sangat buruk. Hal ini menyebabkan mereka sering mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, diare dan malaria. Dengan pendapatan nelayan Pantai Depok yang semakin meningkat, sebagian dari mereka mulai dapat membangun rumah yang sudah memenuhi syarat kesehatan. Sehingga aktivitas MCK (mandi, cuci, kakus) sudah dapat dilakukan di rumah mereka sendiri.

Sejauh ini, TPI sendiri sudah dikatakan mampu untuk mewadahi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang awalnya hanya bekerja sebagai petani kemudian beralih menjadi nelayan dan bahkan ada yang melakukan keduanya sebagai mata pencaharian. Masyarakat sendiri sangat mendukung adanya TPI karena mereka merasa sangat terbantu baik untuk menjual hasil tangkapannya atau sebagai wadah yang menaungi kelompok nelayan yang ada di dusun Bungkus dan Depok dan hal ini juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kedua dusun ini, namun juga dusun sekitar dan juga nelayan yang datang untuk mencari ikan di wilayah sekitar Pantai Depok.

Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya TPI yaitu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya yang tercakup dalam lingkup daerah mina bahari 45, yaitu masyarakat di dusun Bungkus dan dusun Depok. Dengan adanya TPI, andalan masyarakat awalnya adalah bertani dan banyak dari pada masyarakat yang membuat produk gula jawa untuk diperjual belikan dan mencari nafkah, maka dari itu, seiring perjalanan waktu, banyak masyarakat mulai berfikir untuk menggali potensi dari laut

selatan disekitar mereka. Sehingga pada tahun 1998, saat adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, pemerintah daerah mendatangkan 3 kapal yang diuji coba untuk memasuki wilayah pantai depok.

Namun, menurut hasil wawancara kepada pengelola TPI dan dinas terkait, pengembangan TPI jika dilihat dari sudut pandang pendistribusian dapat dikatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dalam pendistribusian, semua ikan yang berhasil di tangkap dan jual melalui TPI semua laku terjual. Yang menjadi kendala paling besar adalah tidak menentunya hasil tangkapan dari para nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti cuaca, ombak dan lain sebagainya. Kemudian kendala yang paling signifikan lainnya adalah tidak adanya dermaga atau tempat kapal bersandar ke daratan. Hal ini karena kondisi alam tidak mendukung. Selain itu, terjadi pendangkalan daratan karena kondisi ombak yang kurang menentu dan juga pergeseran muara karena kondisi alam yang tidak bisa ditentukan. Sehingga dibutuhkan teknologi yang sangat mumpuni.

Selain itu, Untuk ukuran wilayah Mina Bahari 45, rata-rata hasil tangkapannya adalah 5-6 ton. Untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat, jumlah ini sangatlah sedikit karena kebutuhan masyarakat terbagi dengan wisatawan yang datang kepantai. Jika dijumlahkan, kebutuhan dalam 1 tahun itu mencapai 300 ton ikan untuk mencukupi kebutuhan ikan bagi masyarakat dan para pendatang. Sebagai pengelola, jika terjadi hal seperti ini, para pengurus dan pengelola sudah siap untuk mendatangkan pasokan ikan dari daerah lain khususnya dari wilayah pantura.

Hal ini juga karena kapal yang beroperasi di wilayah pantai depok ini masih kapal kecil, sedangkan kapal besar yang dimiliki oleh TPI Depok masih ditempatkan di TPI Sadeng yang lebih dekat dengan wilayah Jawa Timur. Karena pelabuhan di Sadeng cukup besar dan kondisi perairan disana cenderung lebih tenang dari Pantai Depok. Hal ini terus dicarikan solusi untuk pemecahannya, namun dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit karena ini menyangkut dengan alam, sedangkan di wilayah Pantai Depok

tidak ada pemecah ombak untuk dapat menangkal kuatnya ombak dan gelombang sehingga, secara teknis di Pantai Depok dalam waktu dekat ini tidak dapat dibangun pelabuhan atau dermaga untuk kapal. Hal ini diutarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (KKP DIY) sendiri, selain itu, untuk pembangunan pelabuhan besar di Tanjung Adikarto juga sampai saat ini masih sangat diusahakan.

Untuk saat ini, Dinas KKP DIY membagi porsi dari tiap-tiap TPI dan pengelolaan laut di wilayah DIY. Hal ini terkait dengan perizinan dan juga penetapan kapasitas baik dari kapal yang digunakan dan juga sumber daya manusia yang diperbolehkan untuk mengeksplorasi hasil laut DIY. Dinas KKP juga mengatur pengelolaan dari penangkapan dan juga memberikan peringatan kepada para nelayan yang dengan sengaja melanggar peraturan yang ada, seperti contohnya dalam hal penggunaan peralatan dalam mencari ikan dan juga menangkap ikan dan fauna laut yang dilindungi. Namun, secara teknis, kepengurusan dari TPI ini sendiri dibawah dari Pemerintah Kabupaten, namun dari pemerintah kabupaten ini juga tetap berkoordinasi dengan Dinas KKP DIY. Kepengurusan ini mencakup program pelatihan, pengembangan dan kegiatan dari TPI itu sendiri.

Jika dilihat dari definisi dan tujuan, TPI itu hanya tempat pelelangan yaitu jual beli ikan, sedangkan untuk kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan itu masuk ke dalam kegiatan kelompok, sehingga hal ini menjadi kegiatan rutin sehingga pengurus dari TPI disini bertugas sebagai fasilitator untuk para nelayan, jadi TPI tidak bertugas sebagai pengurus dari kelompok nelayan namun fungsinya adalah sebagai fasilitator.

Menurut Dinas KKP DIY, yang menjadi perhatian kedepannya adalah saat pelabuhan di Tanjung Adikarto dan bandara internasional di Kulonprogo sudah beroperasi, hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, hal ini dikarenakan nelayan yang melaut tidak hanya dari DIY saja, namun nelayan yang berasal dari daerah sekitar DIY seperti Cilacap dan

sekitarnya akan datang dan mencari ikan di wilayah DIY, sehingga kita juga harus berkoordinasi dengan daerah sekitar DIY.

4.2.2 Upaya Optimalisasi Peran TPI Depok Dalam Membangun Pertahanan Kawasan Pesisir

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak disektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah. Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam dimensi lokalitas, agar dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional, pembangunan dilakukan secara terpadu, merata, dan berkeadilan serta menghindari egoisme sektoral dan distrik.

Keberadaan wilayah pesisir khususnya di pulau Jawa yang membentang luas, yang memanjang di pesisir pantai, yang memiliki peluang besar untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan atau laut yang terbentang luas di hadapannya, yang sekaligus dihadapkan pada masalah keamanan laut yang setiap saat dapat terjadi di wilayah perairan atau laut, yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat wilayah pesisir. Menjaga kelestarian lingkungan tidak cukup dengan memberikan dukungan saja, tetapi perlu adanya perlu tindakan nyata guna lebih memberikan dampak yang bermanfaat demi kelestarian lingkungan pesisir. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan telah menjalankan perannya untuk membantu memberikan pengawasan dan penjagaan di kawasan pesisir di pantai Parangtritis. Menurut Rudy Suharta dari dinas kelautan dan perikanan kabupaten sebelum kewenangannya dialihkan ke provinsi pada tahun 2013 telah membentuk desa mandiri dimana dinas kabupaten Bantul sebagai *leading sector* bersama masyarakat pesisir pantai parangtritis melakukan beberapa program seperti pengolahan ikan untuk menambah nilai agar memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat khususnya nelayan. Selain itu masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi menjaga keamanan dengan mengawasi wilayah pesisir pantai.

Gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perairan atau laut dibedakan, yaitu:

- a. Gangguan keamanan yang berasal dari luar (*eksternal*), dapat dikemukakan, diantaranya:

- 1) Pencurian ikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan negara luar (seperti Filipina, Thailand dan Malaysia).
 - 2) Penyelundupan barang-barang (barang elektronik, pakaian bekas, barang konsumsi (makanan, rokok, narkoba, dan sebagainya) yang dapat merugikan penerimaan serta merusak negara,
 - 3) Penyusupan imigran gelap dari negara bergolak (seperti Afganistan, dan sebagainya) menggunakan perahu, yang masuk melalui wilayah pesisir, dengan tujuan Australia atau Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, banyak imigran gelap dari Vietnam atau Kamboja menggunakan perahu, yang dikenal sebagai manusia perahu.
- b. Gangguan keamanan yang terjadi dari perbuatan orang-orang di dalam negeri (*internal*), dapat disebutkan, yaitu:
- 1) Seperti penggunaan bom oleh nelayan untuk menangkap ikan, yang berdampak merusak lingkungan dan membahayakan terhadap keselamatan diri pelakunya dan,
 - 2) Terjadinya perompakan (perampokan di laut) yang mengganggu keamanan kapal-kapal yang mengangkut barang (Adisasmita, 2013).

Menurutnya pemerintah dalam hal ini Dinas kelautan dan perikanan telah membantu dalam hal pengawasan melalui bidangnya yaitu bidang kelautan pesisir dan pengawasan berkoordinasi dengan dinas kabupaten dalam menjaga keamanan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menangkal dan mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perairan, maka sumber daya yang ada pada masyarakat pesisir dapat diberdayakan perannya, khususnya bagi para nelayan diperlengkapi dengan alat komunikasi, yang setiap saat dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pos penjagaan keamanan di perairan atau laut yang dikelola oleh pihak Angkatan Laut seperti yang terdapat di wilayah Parangtritis yaitu Pos Keamanan Laut (PosKamLa) ataupun dinas kepolisian perairan dalam hal ini yang terdekat adalah kepolisian perairan Depok, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengamanan

secepatnya, sehingga terjadinya gangguan keamanan di laut dapat diatasi dengan baik.

Nelayan penangkap ikan jumlahnya sangat banyak, tersebar di wilayah perairan laut, dapat dimanfaatkan peranannya untuk membantu menjaga keamanan di laut. Perlu kita sadari bahwa wilayah perairan atau laut di pulau Jawa khususnya sangat luas, sedangkan jumlah kapal patroli dan fasilitas penjagaan keamanan laut yang dimiliki Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Polisi perairan yang ada di tingkat provinsi sangat begitu terbatas, maka tingkat efektivitas penjagaan keamanan laut adalah juga terbatas, maka dalam hal ini peranan masyarakat pesisir pada umumnya dan nelayan penangkap ikan pada khususnya dapat dimanfaatkan dan diberdayakan peranannya untuk membantu menjaga keamanan di laut, terhadap segala kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di laut, baik gangguan yang dari luar yang sifatnya eksternal maupun gangguan yang berasal dari dalam yang bersifat internal. (Adisasmita, 2013) Jelaslah, bahwa peranan masyarakat pesisir khususnya nelayan sangat penting dan besar, yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu untuk melangsungkan kehidupannya menangkap, mengolah, dan memasarkan komoditas ikan hasil tangkapannya pada satu pihak, dan di lain pihak dalam bidang keamanan di laut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan peranannya membantu penjagaan keamanan di laut. Perlu dibentuk dan diberdayakan Sistem Keamanan Lingkungan Maritim (Siskamlingmar). Sejalan dengan hasil wawancara dengan kepolisian perairan Pak Bayu saat ini telah terdapat kelompok masyarakat pengawas (PokMasWas) di Parangtritis. Kelompok tersebut dibentuk guna memberikan pengawasan dan penjagaan di area wilayah pesisir pantai Parangtritis seperti contoh Contohnya pernah ada kejadian perahu imigran yang terombang ambing ditengah laut, nelayan melapor ke kita, dan kita membawa mereka dan dilaporkan ke Dinas imigrasi untuk mengurus hal tersebut.

Jadi, dengan potensi ikan yang melimpah maka perlu adanya pengawasan dan penjagaan keamanan di wilayah pesisir. Penangkapan

ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan dan tidak ramah lingkungan kerap sekali terjadi dan juga pengrusakan terumbu karang akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga perlu menjadi perhatian. Untuk memberikan keuntungan bagi nelayan sendiri, dukungan dari pemerintah sudah baik dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengawasi dan menjaga keamanan. Selain itu, peran pihak-pihak berwenang seperti TNI Angkatan Laut serta Polisi Perairan (Polair) juga sudah baik. Dalam proses pelelangan juga pihak Dinas kelautan dan perikanan juga memberikan keamanan saat terjadi proses lelang, hal ini dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian serta kecurangan yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh pemodal ataupun pengambil atau pengurus pelelangan. Dari segala aspek mulai penjagaan keamanan pesisir dan pengawasan tempat pelelangan ikan sudah berjalan dengan baik. Yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi kinerja yang selama ini belum dilakukan secara berkelanjutan.

Disisi lain, karena wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara/dunia luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan negara/dunia global. Namun, menurut pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, tantangan yang harus segera dicarikan solusi pemecahannya adalah pengembangan ekonomi seperti tuntutan adanya industri pengolahan hasil tangkapan dan budi daya perikanan, selain itu permasalahan tata ruang wilayah menuntut adanya master plan penataan secara spasial terpadu dengan menonjolkan konsentrasi sebagai wilayah pertanian lahan, pelelangan ikan, eksplorasi sumber daya mineral, dan wisata bahari.

Hal ini didasari oleh kondisi dari masyarakat pesisir yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, sedangkan kebutuhan mereka yang semakin meningkat, maka dalam jangka panjang, tekanan terhadap sumber daya pesisir semakin tinggi guna memenuhi kebutuhan

hidup masyarakatnya. Melihat potensi sumber daya pesisir dengan aktivitas kehidupan masyarakatnya, selayaknya pemerintah daerah secara mandiri maupun bermitra baik dengan para *stakeholder* dari Dinas pemerintahan dan dengan sekalipun swasta untuk memilih pendekatan perencanaan pembangunan yang tepat bagi pengembangan wilayah tersebut. Perencanaan yang baik adalah yang mampu mengakomodasi semua yang mempunyai kepentingan dan juga memberi manfaat sehingga dapat dinikmati oleh semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah, swasta yang bermitra atau berinvestasi, maupun masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya dari kegiatan penangkapan dan pemasaran hasil ikan laut.

Menurut Kabid Bina Usaha, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul, saat ini bantul secara keseluruhan sudah membina sekitar 128 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Bantul. Kebanyakan UMKM binaan itu banyak yang berkecimpung di bidang pengelolaan dan budidaya ikan. Dari ratusan UMKM tersebut, ternyata kebutuhan bahan baku ikan laut sekitar 50 persen di antaranya berasal dari luar daerah. Sementara pasokan ikan laut dari nelayan lokal di Bantul masih jauh dari kata cukup.

Minimnya jumlah tangkapan ikan di Bantul disebabkan karena saat ini para nelayan di Bantul kebanyakan masih menggunakan perahu seadanya, yakni jenis perahu motor tempel. Jika dihitung keseluruhan jumlah perahu tersebut di sepanjang pantai di Bantul berjumlah 200 kapal. Sementara untuk perahu ukuran sedang dan besar belum ada. Ini bukan berarti Kabupaten Bantul tidak memiliki kapal berkapasitas besar, Kabupaten Bantul sebenarnya memiliki Kapal Inka Mina jumlahnya dua, kesemuanya dikelola koperasi nelayan usaha bersama. Kedua kapal itu kapasitasnya di atas 30 Gross Tonnage (GT), kapal ini berlabuh di pelabuhan Sadeng, Gunung Kidul. Namun sayangnya hasil tangkapan kapal besar seperti Inka Mina langsung dijual ke luar daerah, bahkan ada yang diekspor. Disisi lain, untuk mengembangkan sektor tangkap ikan di

Bantul menurut Nanang juga agak susah. Selain karena tiadanya kapal penangkapan ikan yang cukup besar, ditambah tiadanya pelabuhan yang representatif. Maka dari itu, untuk mendongkrak hasil tangkapan ikan nelayan lokal di Bantul dan agar bisa menutupi kekurangan ikan laut yang selama ini banyak didatangkan dari luar daerah.

Hal tersebut sangat disayangkan jika melihat Kabupaten Bantul mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, baik potensi perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Berdasarkan data statistik dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul 2014 produksi perikanan budi daya Bantul sebanyak 13.016,98 ton, sementara produksi perikanan tangkap sebesar 941,75 ton. Oleh sebab itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bantul sedang berupaya untuk memberikan perhatian lebih kepada para nelayan, seperti memberikan bantuan alat tangkapan ikan atau jaring. Karena saat ini, profesi nelayan sudah mulai sedikit ditinggalkan oleh masyarakat.

Menurut salah seorang pengurus dari TPI Depok, kendala dalam pengelolaan TPI ini sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dalam pendistribusian, semua ikan yang berhasil di tangkap dan jual melalui TPI semua laku terjual. Yang menjadi kendala paling besar adalah tidak menentunya hasil tangkapan dari para nelayan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti cuaca, ombak dan lain sebagainya. Selain itu, kendala paling signifikan adalah tidak adanya dermaga atau tempat kapal bersandar ke daratan. Hal ini karena kondisi alam tidak mendukung. Selain itu, terjadi pendangkalan daratan karena kondisi ombak yang kurang menentu. Sehingga dibutuhkan teknologi yang sangat mumpuni.

Selain itu, faktor SDM masih menjadi kendala serius. Dari 2.400-an nelayan yang terdata, hanya 50-60 saja yang bisa dijadikan kader sebagai nelayan handal. Sistem magang nelayan yang semula diberlakukan mulai dihentikan tahun ini karena hasil yang kurang efektif. Sebagai gantinya, DKP membuat program lain dengan memaksa nelayan yang memiliki kemampuan mengoperasikan kapal besar untuk datang ke DIY. Nelayan pantai Depok, adalah beberapa nelayan di pantai selatan juga terbatas

akan waktu, hal ini berkaitan dengan keyakinan akan hal keramat menjadikan beberapa hari yang dianggap sebagai sakral, yaitu hari-hari nelayan dilarang untuk melaut dan menangkap ikan. Beberapa hari tersebut adalah, saat hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Diahari-hari tersebut nelayan sama sekali tidak diperbolehkan melaut, ataupun juga nelayan juga sudah merasa sadar akan pantangan tersebut. Akibat akibat lain akan dapat ditimbulkan akan kejadian ini, karena pasalnya nelayan-nelayan pesisir pantai selatan sama sekali tidak mendapatkan pemasukan penghasilan dari hasil tangkapan ikan seperti biasanya.

Pada penelitian ini, pihak terkait yang berkecimpung di dalam pengembangan kawasan pesisir mengatakan bahwa sejauh ini TPI sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun, perlu adanya perbaikan di beberapa sektor. Hal ini dirangkum dalam beberapa poin yang diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan dasar dalam pengembangan TPI dan pihak-pihak terkait kedepannya. Bentuk dukungan dan arahan yang harus dijalankan kedepannya tidak berpusat pada pengembangan dari TPI Depok semata, namun secara luas kepada seluruh kawasan pesisir laut selatan. Karena TPI merupakan bagian kecil dalam pengembangan masyarakat di kawasan pesisir yang kehidupannya bergantung dari hasil laut selatan pulau Jawa.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara/dunia luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan negara/dunia global. Maka perlu dukungan dari tiap *stakeholder* yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dalam kaitan untuk menguatkan pertahanan di kawasan pesisir, perlu adanya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, maka pendekatan dan model pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini dominan dilaksanakan secara sektoral dan terpilah-pilah, saat ini TPI Depok khususnya merupakan fasilitator dan regulator dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari para nelayan yang ada di wilayah Pantai

Depok atau sebagai moderator dalam mengidentifikasi, memelihara dan mempromosikan, implementasi, serta evaluasi rencana pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara terpadu. Dengan demikian kerangka kerja proyek pesisir adalah proses dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir yang menguntungkan dan berkesinambungan melalui partisipasi aktif dan aksi-aksi bersama antar semua stakeholder. Berdasarkan hasil wawancara dan dari data serta dokumen yang mendukung penelitian ini, diambil beberapa upaya yang harus dilaksanakan yaitu:

a. Membentuk Model Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Model pengelolaan wilayah pesisir yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berupa:

- 1) Proses partisipatif dalam penilaian ekonomi sumber daya (economic valuation);
- 2) Perencanaan terpadu, seperti penyusunan Rencana Daya Tarik Obyek Wisata (RDTOW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRW Pesisir);
- 3) Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui penciptaan alternatif mata pencaharian berbasis kelautan tanpa merusak lingkungan seperti budi daya perairan dan biota laut;
- 4) Implementasi pemanfaatan wilayah pesisir/laut yang berbasis masyarakat;
- 5) Pelatihan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir; dan
- 6) Analisis kebijakan, pemantauan, dan evaluasi yang mengikutsertakan seluruh stakeholder.

Mengingat wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Bantul cukup luas dan masih natural, maka kebutuhan akan kawasan demonstrasi proyek sebagai *working model* perlu dipilih, dengan tujuan akhir untuk mencegah praktek-praktek yang merusak lingkungan. Cara yang ditempuh antara lain mengelola aktivitas manusia (pengguna) yang mendukung pada usaha-usaha ekonomi dan konservasi dengan mengontrol aktivitas luar yang merusak sumber daya.

Dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat, komponen yang dikondisikan adalah:

- 1) Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan saat ini dan generasi mendatang;
 - 2) Masyarakat setempat dipersilakan langsung mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab;
 - 3) Tenaga penggerak berasal dari masyarakat tingkat lokal, dan menyediakan keputusan di tingkat lokal. Instansi pemerintah hanyalah fasilitator dan mengontrol berjalannya proses tersebut; dan
 - 4) Kebijakan (*policy*) diperlukan untuk perijinan dari tingkat atas.
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Berbasis Sumberdaya Alam dan Masyarakat.

Prinsip pengelolaan potensi pesisir yang terpadu di Kabupaten Bantul adalah partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*), seperti nelayan, pemda/pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka paradigma dan pengelolaan pesisir, kewenangan terbesar ada di tingkat kabupaten. Oleh karena itu daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk mengelola sumber daya dan memanfaatkannya untuk kemakmuran masyarakat lokal. Namun demikian pemberlakuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (*sustainable*) masih harus terus diperjuangkan dan dikawal agar semangat pemda mengejar peningkatan PAD tetap pada jalurnya yaitu menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Permasalahan pengelolaan pesisir biasanya dihadapkan pada kondisi kurangnya pendidikan, pengetahuan, dan tekanan ekonomi. Jadi, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dilakukan peningkatan kemampuan mengelola sumber daya wilayah. Di samping itu, kurangnya kemampuan pengelolaan lain biasanya berasal dari

lemahnya kerja sama lintas sektor dan adanya konflik antarpara pengguna, sehingga penyelesaian konflik dan permasalahan di tingkat pengguna memerlukan komitmen pada tingkat pengambil keputusan lebih tinggi, lembaga sektoral dan non-sektoral, dan praktisi politik.

Dengan demikian pengendalian lingkungan pesisir pendekatannya tidak cukup mengandalkan pengendalian fisik, teknologi, hukum, dan kelembagaan tetapi juga masalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai potensi mengembangkan dan sekaligus merusak. Di samping itu kecenderungan tawar menawar politik antara eksekutif dan legislatif juga menentukan jenis kebijakan dan implikasi pembangunan.

c. Tata Ruang Wilayah Pesisir yang Dinamis dan Terpadu.

Permasalahan pembangunan dan penataan ruang di wilayah pesisir dengan pendekatan dan metodologi pengelolaan ruang kawasan pesisir seyogyanya menerapkan Model Dinamis. Dipandang dari dimensi epistemologi adalah merumuskan suatu konsep penataan ruang wilayah ekologis terpadu (pendekatan *ecoregion*) sebagai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara kausalitas bersifat timbal balik dan dinamis dari suatu kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka mencapai tujuan dan berlangsung di atas suatu ekosistem.

Kemudian setelah itu diamati dampaknya terhadap keberlangsungan kemampuan dan fungsi ekosistem itu sendiri dalam jangka waktu tertentu. Kawasan pesisir perlu dilakukan pemanfaatan dan perencanaan tata ruang secara berkesinambungan. Dipandang dari ontologi pendekatan pembangunan yang terpilih di kawasan pesisir merupakan cerminan suatu bangsa, dan dipandang dari aksiologi perencanaan yang berhati-hati selalu mempertimbangkan konsevasi alam.

Dalam perencanaan tata ruang secara spasial di kawasan pesisir juga mempertimbangkan peningkatan pemahaman keterkaitan biofisik dan sosial ekonomi antara wilayah hulu dan hilir sekitar pantai sehingga

mampu menganulir kekhawatiran yang berlebihan mengenai permasalahan dampak lingkungan yang semakin meningkat di kawasan pesisir dan laut. Hal inilah menunjukkan semakin pentingnya diberlakukan pergeseran paradigma pembangunan pesisir dan kelautan dari yang semula sektoral atau fragmentatif atau deterministik menjadi holistik atau integratif. Kuncinya terletak pada peningkatan kualitas interkoneksi yang saling menguntungkan antara manusia dan seluruh ekosistem yang ada. Semuanya dimaksudkan untuk menentukan nasib keberlangsungan dan kelestarian alam pesisir.

Program pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mencakup aspek:

- 1) keterpaduan tata ruang daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan dengan pilar program kawasan lindung, konservasi dan pemanfaatan,
 - 2) pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pada sumber daya alam dan berbasis masyarakat, dan
 - 3) pembentukkan kelembagaan yang kuat.
- d. Perangkat Regulasi.

Regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan kawasan pesisir adalah Perda Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul. Namun demikian Perda tersebut belum cukup karena tidak secara spesifik mengatur jenis perencanaan pembangunan kawasan pesisir.

Secara nasional terdapat produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut secara rinci diatur proses kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah

secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat potensi sumber daya alam pesisir Kabupaten Bantul mempunyai kaitan langsung dengan Undang-Undang tersebut maka pemda perlu mengatur lebih lanjut penataan ruang di kawasan pesisir sesuai dengan konsentrasi peruntukan kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Spesifikasi spasial aktivitas pesisir pantai perlu diatur dan dilindungi, sehingga tampak jelas yang mana merupakan zonasi konsentrasi perikanan, budi daya tanaman pangan, wisata bahari lain, dan eksplorasi sumber daya mineral pasir pantai. Hal itu untuk melindungi kelestarian potensi dan aset sumber daya di kawasan pesisir dengan mengoptimalkan perolehan manfaatnya.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok nelayan yang disebabkan pula oleh akses produksi perikanan/hasil tangkapan yang sedikit, kemudian dari aspek teknologi sebagian besar dari mereka masih menggunakan teknologi tradisional, seperti alat pancing, pemasaran hanya terbatas di sekitar areal wilayah Kecamatan ataupun hanya mengandalkan pasar lokal. Kondisi tersebut secara langsung akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup bagi masyarakat nelayan, salah satu strategi penting dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan dalam usaha meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat nelayan antara lain melalui:

a. Mengembangkan Peran Teknologi Hasil Tangkapan.

Teknologi tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas bagi masyarakat nelayan khususnya di bidang perikanan masih sangat rendah, rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan akan teknologi. Jadi usaha untuk

pemberdayaan bagi masyarakat nelayan khususnya yang berkaitan dengan teknologi tangkapan belum dilakukan oleh pemerintah, walaupun ada bantuan, maka itu berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pemberian beras bagi rakyat miskin.

b. Perlunya Pemberian Akses Modal.

Masalah permodalan bagi masyarakat nelayan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan usaha. Para nelayan dapat bertahan dan berkembang dengan baik serta dinamis jika diiringi dengan akses permodalan. Modal yang minim akan mempengaruhi proses produksi, mempengaruhi pembelian alat pancing, mempengaruhi serta menghambat proses kerja, dan akan terbengkalainya kegiatan usaha bagi masyarakat nelayan.

c. Mengembangkan Sarana Pemasaran

Bahwa kegiatan pemasaran merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh para nelayan guna menjamin ke lancaran penjualan usaha perikanan, sebab melalui kegiatan pemasaran tersebut para nelayan atau anggota kelompok nelayan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Depok memiliki pengaruh dan peran yang baik terhadap meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir disekitar pantai, hal ini terlihat dari beberapa hal, yaitu:
 - a. TPI Depok mampu menjadi fasilitator dan regulator untuk para nelayan yang ada di kawasan Pantai Depok. Selain itu mempermudah pendataan aktifitas nelayan seperti data penjualan ikan berdasarkan komoditasnya serta data hasil tangkapan para nelayan secara keseluruhan.
 - b. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilakukan dan dijalankan di Pantai Depok Bantul, seperti penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdayaguna, dan mendekatkan masyarakat dengan pasar serta membangun solidaritas serta aksi kolektif ditengah masyarakat.
2. Upaya optimalisasi peran TPI Depok dalam mendukung pertahanan kawasan pesisir. Hal ini sangat mendasar namun juga mendesak karena wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan negara luar maka selayaknya menjadi bagian dari basis pertahanan negara di samping untuk melindungi ketahanan mata pencaharian penduduk pesisir dari ancaman dan persaingan global. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari setiap *stakeholder* yang berkecimpung didalamnya. Selain itu kawasan Pantai Depok saat ini sudah menjadi destinasi wisata baik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam di Bantul maupun yang ingin menikmati hasil tangkapan para

nelayan (kuliner). Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan kedepannya diantaranya:

- 1) Penjagaan keamanan kawasan pesisir dan juga proses lelang, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi nelayan dan masyarakat pesisir sekitarnya sehingga dapat memacu dalam meningkatkan jumlah tangkapan nelayan.
- 2) Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pemberian penyuluhan atau seminar betapa pentingnya untuk menjaga keamanan pesisir dan menjaga kelestarian alam sekitarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berbasis sumber daya alam dan masyarakat sehingga terciptanya tata ruang wilayah pesisir yang dinamis dan terpadu.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis akan mencoba memberikan rekomendasi berupa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang bersifat membangun pada tataran ilmu pengetahuan dan tataran praktis, baik yang ditujukan kepada instansi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak akademisi maupun praktisi, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Berikut ini diberikan beberapa saran terkait pengembangan tempat pelelangan ikan dan juga faktor-faktor terkait dalam pengembangan optimalisasi tempat pelelangan ikan sebagai pusat pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam mendukung pertahanan negara. Diantaranya:

- 1) Mempermudah jalur akses informasi mengenai kondisi cuaca serta iklim untuk para nelayan, ini berguna untuk menyiasati kondisi alam di wilayah Kabupaten Bantul yang tidak menentu dan juga merupakan faktor terbesar yang menentukan jumlah hasil tangkapan;

- 2) Pemerintah juga harus dapat meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir di pantai Depok seperti tempat bersandar kapal atau perahu nelayan.
- 3) Meningkatkan kompetensi dalam pelelangan ikan dengan menambah peserta lelang di TPI dengan melibatkan semua elemen yang ada di kawasan Bantul atau DIY.
- 4) Pemerintah juga harus memikirkan tentang akses pasar hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan sentra pemasaran dalam bidang pengolahan dan kuliner, karena banyak dari masyarakat yang datang ke wilayah Pantai Depok hanya sekedar untuk berlibur dan menikmati kuliner yang langsung diambil dari laut. Selain itu, pembentukan asosiasi atau kelompok pengolah dan pemasar juga menjadi elemen penting dalam menjual hasil tangkapan.

b. Penelitian selanjutnya

Saran bagi penelitian selanjutnya berupa memperluas dari batasan penelitian, sehingga, besar harapan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggali strategi serta fenomena yang berkaitan dengan kelautan di wilayah pesisir pantai Depok khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Ditambah lagi, DIY merupakan daerah potensial dengan melihat hasil dari data statistik yang telah disajikan. Besar harapan peneliti, agar penelitiin terkait peran dan strategi pengembangan TPI di Indonesia dan DIY khususnya dapat lebih ditajamkan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. sehingga masyarakat awam, dan utamanya para pemangku kepentingan dapat memahami secara lebih komprehensif terkait peranan dari TPI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pustaka :

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes, Kusnadi, Chandar. 2003. *Teori Dan Manajemen stres*. Malang: Taroda
- Anwar, S. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bath, B.H.S. 1984. *Histo´ria Agra´ria da Europa Ocidental (500-1860)*, 3a ed., Editorial Presenc,a,Lisboa, 370pp.
- Bradford.John F. 2011. *The Maritime Strategy of the United States: Implications for Indo-Pacific Sea Lanes*.article: [online] tanggal (30 November 2015).
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. 2105. *Statistik Tempat Pelelangan Ikan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Darajati, W. 2004. *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Jakarta: Bappenas. (Online, diakses tanggal 18 September 2015 pukul 20.54 WIB, <http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/8223/>)
- Delinom M, Robert. 2007. *Sumber Daya Air Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: LIPI.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul. 2011-2015. *Laporan Review Rencana Strategis Kota Bantul*.
- Dooley.Howard J.2011. *The Great Leap Outward:China’s Maritime Renaissance*.article: [online] tanggal (30 November 2015)
- Franck.travis. 2009. *Coastal adaptation and economic tipping points*. article: [online] tanggal (30 November 2015)
- Hermawan, D. 2006. *Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru Untuk Industri Perikanan Terpadu*. E-jurnal. Universitas Muhammadiyah.
- Handoko, T. H. 2009 *Manajemen*. Edisi 2. BPFE: Yogyakarta

- Hasibuan, M. S. P. 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sinar Grafika Offset : Jakarta
- International Maritime Organization. 1977. *Navigation through the Straits of Malacca and Singapore*. Resolution A.375(X). 14 November.
- Jones, Stephanie. 2011. *Maritime piracy and the cost of world trade*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Kartodirjo, S. 1993. *Sumber Daya Wilayah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kusumosuwisho, Drs. Sisdjiatmo. 1983. *Sajian Dasar Dalam Pengantar Teori Ekonomi Mikro*.
- Marganingrum, D. 2007. *Sumber Daya Air Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: LIPI.
- Natalia & Rene. (2015). *Global Maritime Axis: Indonesia, China, and a New Approach to Southeast Asian Regional Resilience*. *International Journal of China Studies* Vol. 6, No. 2, August 2015, pp. 175-185
- Octavian, Amarulla & Bayu A Yulianto. 2014. *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Park, Dr. Kwang Seo and Kildow, Dr. Judith T. (2014) "*Rebuilding the Classification System of the Ocean Economy*," *Journal of Ocean and Coastal Economics*: Vol. 2014, Article 4.
- Paul Van Deusen. (2009). *Achieving Conservation Goals in Managed Forests of the Southeastern Coastal Plain*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Rahardjo, M.D. 2016. *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Said, B.D. 2012. *Ekonomi Pertahanan Nasional (Generik Studi Ekonomi Pertahanan) Vol. 5 No. 17*. [online] tanggal 29 September 2015 pukul 06.41 WIB, <http://www.fkpmaritim.org/wp-content/uploads/2012/08/Quaterdeck-Nopember.pdf>
- Serafeim Polyzos and Dionissios Minetos. (2007). *Valuing environmental resources in the context of flood and coastal defence project appraisal*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Sutarno. 1999. *Manajemen Masyarakat*: Jakarta: Sagung Seto.
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Tryfon.Korontzis. 2014.*Exception To The Criminal Jurisdiction Of The Coastal State On Merchant And On Naval Vessels In The Hellenic Legal Order*. [online] tanggal (30 November 2015).
- Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Tesis Dan Artikel Jurnal:

- Adam, Lukman. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara).
- Dianto, Muhammad Wahyu. 2012. Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
- Dyah, S P. 2005. *Analisis Efisiensi TPI Kelas 1, 2, Dan 3 Di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*. Tesis. Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djuara, Lubis. 2006. *Pengantar Pengembangan Masyarakat*. Tesis. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Putri, Andina Ramadhani. 2013. Kompetensi Manajer Dalam Meningkatkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Samudera Mina Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
- Primayuda, A. 2002. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Nelayan Dan Pariwisata Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Bogor
- Saputri, Rani Danik. 2013. Bentuk Interaksi Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Mina Bahari Empat Lima Depok Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta.
- Sinaga, Betharia Helena Rotua. 2012. Peranan Pelelangan Ikan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kaitannya Dengan

Pengembangan Wilayah (Studi Perbandingan Aktivitas Tpi Percut Dan Tpi Pekalongan).

Wibowo, Dyan. 2005. Dermaga Kapal Nelayan Dan Tempat Pelelangan Ikan Regional Kabupaten Bantul.

Lampiran 1

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

- a. Kegiatan apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan?
- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan di wilayah pesisir Pantai Parangtritis?
- c. Bagaimana peran KPP untuk memberikan dukungan pada sektor perikanan?
- d. Apa kendala yang dialami dalam pengelolaan perikanan?
- e. Jenis program apa saja yang telah dilaksanakan untuk pengembangan TPI?
- f. Kendala apa yang dialami dalam pengembangan TPI?
- g. Apa yang ingin dicapai dalam pengembangan TPI?
- h. Bagaimana hasil dari adanya TPI di wilayah Depok?
- i. Apa manfaat yang didapatkan dari adanya TPI?
- j. Bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar (nelayan)?
- k. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dengan adanya TPI?
- l. Bagaimana peran TPI dalam mendukung pertahanan negara?

Lampiran 2

MATRIKS TRANSKRIP WAWANCARA

Informan dalam wawancara ini adalah:

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir – Dra. Endang E Rahayu, M.Si (ER)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

- b. Kepala Seksi Pengembangan Penangkapan dan Sapras – Istriyani, S.Pi (IY)
 c. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir – Rudy Suharta, SIP, MM (RS)

Dinas Kepolisian Perairan Depok Kabupaten Bantul

- d. Kepala Seksi Masyarakat Pesisir - Polisi Bayu (BY)

Pengurus TPI dan Tokoh Masyarakat

- e. Ketua TPI Mina Bahari 45 Depok – Sarjunoo (S)
 f. Lurah Desa Parangtritis – Bapak Topo (TP)
 g. Nelayan – Anonim (AM)

Pertanyaan :

- a. Kegiatan apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	bidang kita sesuai tupoksi bidang kelautan pesisir dan pengawasan, kpp itu kelautan pesisir dan pengawasan itu terkait dengan pengelolaan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Nah itu ada tiga elemen pokok yang menjadi

		tugas kita, kita melakukan pengelolaan perencanaan, yang kedua pemberdayaan masyarakat pesisir yang ketiga kita melakukan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan pesisir.
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Di bidang saya yaitu bidang kelautan tidak lepas dari kegiatan perikanan tangkap, perlindungan atau konservasi sumber daya kelautan, pemasaran di tempat pelelangan ikan, pengolahan perikanan tangkap. Tentu kalau di dinas mencakup keseluruhan. Kalau di bidang kelautan mengenai penangkapan, penambahan alat untuk mempermudah penangkapan oleh nelayan, penambahan armada kapal tangkap, kemudian perbaikan sumberdaya manusia berupa pelayanan teknis kepada nelayan, kemudian penyuluhan tentang perlindungan atau konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	yang sudah dilakukan pengelolaannya, ya yang jelas kami fokusnya di pelelangan, dan kami mengawal PAD retribusi jadi jasa usaha dan dasar kami adalah perbup nah perbup itu dasarnya dari perda. Selama ini kalau peningkatan perikanan itu bidang yang mengkoordinasikan kalau kami hanya melaksanakan pelelangan sesuai dengan tupoksi kami dan saya bikin stand baner disana.

- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan di wilayah pesisir pantai Parangtritis?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Trus yang satunya pengawasan, yang tadi disampaikan monitoring pengawasan langsung kerjasama dengan polair dan TNI angkatan laut, yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengrusakan lingkungan atau mungkin penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah, alat-alat yang tidak ramah itu atau <i>illegal fishing</i>
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Pengertian illegal fishing kan luas ya...jadi kalau ada penangkapan ikan ilegal ya kita koordinasikan dengan pihak terkait, membantu memeriksa kelengkapan dokumen kapal. Bentuk pengawasan sekarang sudah ditarik ke provinsi.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Untuk masalah pengawasan kami Cuma memfasilitasi karena kewenangan sekarang ada di provinsi berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014.

- c. Bagaimana peran KPP untuk memberikan dukungan pada sektor perikanan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Kemaren itu ada kegiatan konservasi, ada kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Itu semua harus dikontrol dan monitoring dan

		<p>juga dievaluasi. Dari tiga elemen pokok tugas itu kita banyak sekali program-program yang kita buat kalau di perencanaan itu gimana kita misalnya kita menetapkan pemanfaatan ruang wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, kita melakukan arahan di setiap ruang wilayah itu ada pemanfaatannya melalui perda. Trus yang terkait dengan perijinan-perijinan itu juga kita buat melalui pergub, itu disitu isinya mekanisme perijinan pemanfaatan ruang wilayah laut, pesisir dan laut itu kita pergubkan yg sedang kita proses. Itu dari sisi perencanaan, trus yang di pemberdayaan, kemudian kita mengajak masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan pesisir laut, nah itu kita melakukan sosialisasi, melakukan dukungan teknologi melakukan pelatihan bagaimana mengajak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan diri, jadi SDM itu melakukan pelatihan-pelatihan kebanyakan nelayan. Memperkenalkan pekerjaan alternatif selain sebagai nelayan, kita ngajak dari praktisi, perguruan tinggi dari peneliti kan gitu intinya kita memberdayakan masyarakat itu agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan lingkungannya itu.</p>
2	<p>Informan: RS Waktu : Feb 2017</p>	<p>Kalau pengawasan itu kan katanya gini, kalau di lelangnya kita kelola sendiri kalau di kawasan pesisir kita juga kerjasama dengan dinas provinsi, Pos AL sama Polair. Selain itu di kawasan pesisir juga ada POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), jadi selain melakukan pengawasan dan menjaga</p>

		kelestarian itu mereka juga mengembangkan ekowisata. Jadi kan mereka gak onok gajine kan mas, sehingga mereka itu berkembang sekaligus mengelola ekowisata. Yang pertama menjaga kelestariannya juga mengembangkan ekowisata.
--	--	---

d. Apa kendala yang dialami dalam pengelolaan perikanan?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Nelayan di wilayah Depok merupakan nelayan musiman dan kendala utama dalam penangkapan ikan sangat dipengaruhi faktor alam, dalam hal ini cuaca. Cuaca sekarang ini, sekarang ini sudah tidak mengikuti pola musim seperti yang dulu sehingga menurunkan kapasitas tangkapan ikan. Dan untuk wilayah pesisir pantai Depok tidak ada tempat bersandar atau dermaga untuk perahu nelayan karena faktor geografis yang ada sehingga di wilayah itu tidak ada kapal atau perahu dengan kapasitas yang besar.
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Nelayan atau menangkap merupakan kegiatan mata pecaharian yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, dalam hal ini cuaca. Cuaca sekarang ini, sekarang ini sudah tidak mengikuti pola musim seperti yang dulu sehingga menurunkan kapasitas tangkapan ikan. Solusi yang bisa diambil adalah menambah alat tangkap diupayakan nelayan itu bisa mengandalkan pada alat tangkap yang bervariasi.

3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Kendalanya dengan sumber daya manusia yang ada karena mereka pada dasarnya merupakan petani, juga kendalanya terbentur oleh faktor cuaca dan disana belum terdapat dermaga untuk tempat bersandar perahu nelayan sehingga perahu yang kami miliki masih berkapasitas kecil untuk hasil tangkapnya. Untuk mensiasati jika tidak musim melaut maka tempat ini terkenal dengan kulinernya, jadi untuk itu ikannya kita datangi dari wilayah lain seperti Sadeng.
4	Informan : S Waktu: Feb 2017	Kendalanya, terbentur oleh faktor cuaca dan terutama disini belum terdapat dermaga untuk tempat bersandar perahu nelayan sehingga perahu yang kami miliki masih berkapasitas kecil untuk hasil tangkapnya. Seandainya ada maka hasil tangkap kami akan lebih banyak. Kendala yang ketiga itu hasil tangkap nelayan kita belum bisa diolah di wilayah kita sendiri yang dapat menaikkan nilainya, tapi Alhamdulillah tempat kita terkenal dngan kulinernya akan ikan segar yang langsung dapat dimasak ditempat.
5	Informan : TP Waktu: Feb 2017	Kendala utama adalah faktor cuaca dan keadaan geografis daerah pesisir kita yang kurang terlalu bersahabat karena gelombang daerah ini sangat besar.

- e. Jenis program apa saja yang telah dilaksanakan untuk pengembangan TPI?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Antara lain pembinaan bimtek, pengelolaan penangkapan ikan dan pendidikan masyarakat untuk alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau pelaksanaan secara detail dalam hal jumlah nelayan yang sudah dilatih, daerah mana saja jenis pelatihannya apa saja ada di sana.
2	Informasi : IY Waktu : Feb 2017	Trus adalagi bagaimana mengajak masyarakat meningkatkan kemampuan diri, jadi SDM itu melakukan pelatihan-pelatihan kebanyakan nelayan. Memperkenalkan pekerjaan alternatif selain sebagai nelayan, kita ngajak dari praktisi, perguruan tinggi dari peneliti kan gitu intinya kita memberdayakan masyarakat itu agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan lingkungannya itu.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Peningkatan pelayanan di tempat pelelangan ikan. Terlebih juga mengenai kegiatan di tempat pelelangan ikan (TPI) yang berkaitan dengan pelayanan pelelangan. Tentunya kepuasan nelayan dapat meningkat dengan adanya tempat pelelangan ikan agar mendapat harga yang wajar. Dan memang tempat pelelangan ikan itu dijaga supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Artinya kegiatan lelang itu betul-betul ada pelelangan. Tempat pelelangan ikan betul-betul kegiatan lelang. Kegiatan lelang itu terbukti mampu menjaga ikan itu pada posisi yang layak. Jadi, nelayan

		bisa memanfaatkan hasil tangkapan ikan dan menjualnya sesuai dengan harga pasar
--	--	---

f. Kendala apa yang dialami dalam pengembangan TPI?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Ya tentunya ada, setiap kegiatan pasti ada kendalanya, Terutama sumber daya manusianya biasanya untuk nelayan-nelayan kita kan tergolong apa ya, tergolong masyarakat miskin ya, masyarakat daerah pesisir tergolong kurang mampu. Nelayan di wilayah Depok merupakan nelayan musiman dan kendala utama dalam penangkapan ikan sangat dipengaruhi faktor alam, dalam hal ini cuaca. Cuaca sekarang ini, sekarang ini sudah tidak mengikuti pola musim seperti yang dulu sehingga menurunkan kapasitas tangkapan ikan. Dan untuk wilayah pesisir pantai Depok tidak ada tempat bersandar atau dermaga untuk perahu nelayan karena faktor geografis yang ada sehingga di wilayah itu tidak ada kapal atau perahu dengan kapasitas yang besar.
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Ya kendala di TPI sebenarnya adalah dari sarana prasarana memang belum cukup memadai seperti belum adanya sarana tempat berlabuh atau dermaga sehingga perahu untuk penangkapan ikan yang ada kapasitasnya masih kecil. Dan perlu adanya penambahan pelayanan.
3	Informan : BY	Kalau polair itu kan periksa pas kapalnya kan perlu didata berapa ABK nya, karena resiko

	Waktu : Feb 2017	pekerjaan di tengah itu kan banyak. Kalau mereka gak melapor trus temannya tenggelam misalnya kan dia gak bisa ngajukan asuransi. Kelemahannya itu nelayan itu gak mau ribet dan kalau dia berangkat ya berangkat nah itu resikonya, tau tahu ada kecelakaan.
4	Informan : S Waktu : Feb 2017	pengembangan TPI yang baru sebenarnya tidak ada masalah ya cuman konstruksi yang direhap atau yang diminta nelayan standar sesuai harapan nelayan yaitu TPI bersih sesuai dengan bisa menampung hasil tangkap yang setiap harinya semakin meningkat artinya menampung hasil tangkap nelayan.

g. Apa yang ingin dicapai dalam pengembangan TPI?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu: Feb 2017	Wong ini ke depannya tujuannya untuk mengatur manajemen pengelolaan TPI supaya lebih baik. Dan masyarakat nelayan mendapatkan harga-harga hasil tangkapnya sesuai standar kan gitu. ya intinya setelah harga hasil tangkap dari nelayan itu sesuai dengan pasar aja lah sesuai dengan permintaan pasar.
2	Informan: IY Waktu: Feb 2017	Tentu yang diharapkan adalah penangkapan dan produksi yang meningkat, perluasan, kita sesuaikan syarat-syarat identitas, kebersihan di tempat pelelangan ikan, itu yang kita lakukan di area pelabuhan.

3	Informan: RS Waktu : Feb 2017	kepingin yang pertama itu tadi program Tempat Pelelangan Ikan yang higienis ya pengelolaan TPI yang higienis yang kedua itu imbasnya kan ke Pendapatan antar Daerah kalau itu jalan dengan baik.
4	Informan : S Waktu : Feb 2017	jadi kedua belah pihak baik nelayan dapat harga yang bagus, pedagang dapat harga yang bagus. Jadi pedagang gak rumongso kelারণen nelayan gak rumongso kemurahen. Jadi kita, jasa kita dalam hal itu, otomatis didalamnya ada transaksi kan dan kita juga mengawasi transaksi itu. Kalau ada macetnya kita juga menjadi mediasi.
5	Informan : BY Waktu : Feb 2017	Yang ingin dicapai adalah kesepakatan harga antara nelayan dengan pembeli (pedagang) sehingga tidak ada yang dirugikan. Kedepannya akan tercipta lingkungan di TPI yang aman dan tentram tidak ada ribut-ribut mengenai harga tersebut.

h. Bagaimana hasil dari adanya TPI di Wilayah pantai Depok?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : IY Waktu : Feb 2017	nah itu lah perlu evaluasi yang berkelanjutan artinya berkala dalam satu tahun 2 kali atau 3 kali harus tetep dipantau, cuman selama ini kita cuman menerima pelaporan mengenai monitoring jumlah produksi dan harga ikan itu memang ada pelaporannya tapi secara rinci atau secara detail sudah sesuai dengan yang kita harapkan sesuai harga lelang atau tidak itu yang tahu persis ya dilapangan.

2	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Ya dengan adanya tempat pelelangan ikan itu hasilnya kesejahteraan masyarakat meningkat.
3	Informan : S Waktu : Feb 2017	ya kalau untuk nelayan bisa dirasakan seperti tadi, dengan tonase yang jelas harga yang jelas semua ABK kan dapat upah yang sesuai, kalau pedagang sendiri, dengan ada pelelangan ya otomatis dapat harga yang baik juga untuk dia menjual lebih lanjut.
4	Informan : TP Waktu : Feb 2017	Dengan adanya TPI di wilayah Depok sangat membantu masyarakat sekitarnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan sangat terasa seperti taraf pendidikan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat.

i. Apa manfaat yang didapatkan dari adanya TPI?

No	Palaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	ya bagus, kita misal koordinasi dengan kabupaten misal mau mengadakan sosialisasi kita minta perwakilan dari nelayan disiapkan untuk menerima program dari pusat berapa orang. Disana nanti kita kumpulkan kita beri wawasan dulu program-program kita itu jabarannya seperti apa. Kemudian dari kabupaten memberi arahan juga sesuai dengan kewenangan mereka, kita arahkan sesuai dengan pedoman umum yang sudah diterima dan pedoman teknis kita buat disini sesuai dengan program arahan dari pusat. Setelah itu

		kita adakan semacam tanya jawab atau diskusi apa uneg-uneg mereka yang mereka mau.
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Lha itu bisa meningkatkan pendapatan nelayan juga membantu proses lelang ikan sehingga hasil tangkapan mampu disesuaikan dengan harga pasar. Sehingga masyarakat disana tidak tergantung dari sumber pertanian saja, ketika musim melaut maka peningkatan mereka akan semakin meningkat.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Ya kan seperti tadi soal pendapatan asli daerah (PAD) yang berimbas kepada pemerintah.
4	Informan : S Waktu : Feb 2017	ya kalau untuk nelayan bisa dirasakan seperti tadi, dengan tonase yang jelas harga yang jelas semua ABK kan dapat upah yang sesuai, kalau pedagang sendiri, dengan ada pelelangan ya otomatis dapat harga yang baik juga untuk dia menjual lebih lanjut
5	Informan : TP Waktu : Feb 2017	dengan adanya pelelangan yang dikelola KUD nelayan itu mendapatkan haknya sesuai dengan hak yang diinginkan. Artinya begini, sampeyan dapat ikan satu ton kan dilelang sampeyan pulang misal harga 8 ribu kan uangnya 8 juta ya sampeyan pulang sudah ada pikiran 8 juta.
6	Informan : AM Waktu : Feb 2017	Terimakasih saya, dengan adanya TPI yang difasilitasi pemerintah manfaat khususnya untuk nelayan itu sangat mudah satu untuk tempat pembongkaran. Dan di situ ada peraturan pemerintah perda intinya dengan aturan hasil tangkap itu lelang jadi fasilitas pelelangan ikan.

- j. Bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar (nelayan)?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	ya bagus, kita misal koordinasi dengan kabupaten misal mau mengadakan sosialisasi kita minta perwakilan dari nelayan disiapkan untuk menerima program dari pusat berapa orang. Disana nanti kita kumpulkan kita beri wawasan dulu program-program kita itu jabarannya seperti apa. Kemudian dari kabupaten memberi arahan juga sesuai dengan kewenangan mereka, kita arahkan sesuai dengan pedoman umum yang sudah diterima dan pedoman teknis kita buat disini sesuai dengan program arahan dari pusat. Setelah itu kita adakan semacam tanya jawab atau diskusi apa uneg-uneg mereka yang mereka mau
2	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Yaaa.. mereka sangat membutuhkan, sangat antusias dengan tempat pelelangan ikan untuk menyeimbangkan harga agar sesuai dengan harga pasar.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Ya melaksanakan transaksi di pelelangan tadi, bentuk dukungan mereka. Mereka mau melaksanakan itu kan, konsekuensinya kan mereka ada retribusi tapi mereka tetep mau kan. Padahal kan, kamu datang ke sini kita tarik tapi mereka mau karena manfaatnya ya itu tadi...fair...pelaksanaannya.
4	Informan : BY Waktu :	untuk melakukan itu kita gak bisa sendirian, harus mengajak masyarakat kan. Masyarakat banyak yang mendukung kita dengan

	Feb 2017	POKMASWAS kita bentuk mereka kita ajak kejasama. Mereka juga melakukan pengawasan, mereka berkoordinasi dengan kita, dengan poskamla tadi itu melaporkan kan tugasnya kegiatan tadi baru kita menindak.
5	Informan : AM Waktu: Feb 2017	sangat antusias, karena fasilitas itu sangat penting khususnya untuk nelayan dan masyarakat sekitar wilayah pantai Depok, kalo perlu untuk difasilitasi untuk tempat dermaga sehingga perahunya biasa ditingkatkan ukuran kapasitasnya.

- k. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dengan adanya TPI?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : IY Waktu : Feb 2017	Ada perubahan secara sosial ekonomi di wilayah sekitar pantai Depok, kenaikan secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.
2	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Kalau pendapatan sudah cukup tinggi mas kalau disana. Tapi itu tergantung musimnya.
3	Informan : TP Waktu : Feb 2017	dengan adanya pelelangan yang dikelola KUD nelayan itu mendapatkan hakya sesuai dengan hak yang diinginkan. Artinya begini, sampeyan dapat ikan satu ton kan dilelang sampeyan pulang misal harga 8 ribu kan uangnya 8 juta ya sampeyan pulang sudah ada pikiran 8 juta.

4	Informan : AM Waktu : Feb 2017	dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan perkembangannya semakin tahun semakin meningkat dari pola kesejahteraan nelayan pun juga sangat bermanfaat artinya jika tidak musim melaut kita dapat memanfaatkan wisata kuliner yang ada disini.
---	---	---

I. Bagaimana peran TPI dalam mendukung pertahanan negara?

No	Pelaksanaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Informan : ER Waktu : Feb 2017	Pertahanan negara itu tugasnya adalah TNI. Kalau untuk TPI sendiri tugasnya mengatur dan menjaga harga yang sesuai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik itu nelayan ataupun pembeli atau pedagang.
2	Informan : IR Waktu : Feb 2017	TPI itu tempat pelelangan. Kalau untuk mendukung pertahanan ya cuma kami hanya bisa memfasilitasi tempatnya untuk sosialisasi ke masyarakat atau nelayan saja seperti tentang yang disebutkan mas tadi yaitu sosialisasi tentang bela negara ataupun radikalisme.
3	Informan : RS Waktu : Feb 2017	Bingung saya jawabnya mas karena ini dua hal yang berbeda hehe...
4	Informan : BY Waktu : Feb 2017	Kalau masalah radikalisme atau mendukung pertahanan negara ya kita selalu berkoordinasi dengan dinas yang terkait seperti kita selalu mengadakan sosialisasi ditempat pelelangan perihal radikalisme ataupun bela negara. untuk melakukan itu kita gak bisa sendirian, harus mengajak masyarakat kan. Masyarakat banyak

		<p>yang mendukung kita dengan POKMASWAS kita bentuk mereka kita ajak kejasama. Mereka juga melakukan pengawasan, mereka berkoordinasi dengan kita, dengan poskamla tadi itu melaporkan kan tugasnya kegiatan tadi baru kita menindak. Contohnya pernah ada kejadian perahu imigran yang terombang ambing ditengah laut, nelayan melapor ke kita, dan kita membawa mereka dan dilaporkan ke dinas imigrasi untuk mengurus hal tersebut.</p>
--	--	--

Lampiran 3

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
Nomor	: B/ 51 /I/2017	Bogor, 10 Januari 2017
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.	Kepada Yth. Kepala Kesbangpol Kab. Bogor di Bogor

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2015/2016.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Jumsin Sobri NIM: 120150205010, nomor HP: 08151821845, email: jumsin.sobri@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Optimisasi Peran TPI Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok DIY)".
- c. Sebagai persyaratan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta maka dibutuhkan surat rekomendasi penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Bogor.

3. Berkaitan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,





Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng.
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Dekan FMP
4. Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Kesbangpol Provinsi DIY Yogyakarta
6. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JK/SR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong-Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 46 -Keshangpol

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
 Jabatan : Kepala Seksi Idwasbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Berdasarkan surat Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan – Universitas Pertahanan tanggal 10 Januari 2017, nomor : B/51/I/2017 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.

Dengan ini menerangkan :

a.	Nama	Juslin Sobri
b.	Pekerjaan	Karyawan Swasta
c.	Alamat	Jln. Merpati II/16 RT. 004 RW. 006 Kel. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan
d.	Peserta	1 (satu) orang
e.	Maksud	Penelitian Untuk Penyusunan Tesis
f.	Penanggung jawab	Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
g.	Judul Penelitian	<i>Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depok Daerah Istimewa Yogyakarta)</i>
h.	Lokasi	Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
i.	Lembaga/instansi yang dituju	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Selubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas seperti yang.

Demiikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku mulai Tanggal : Januari s.d. Juni 2017.

Cibinong, 07 Januari 2017.



Terbitusan : Kepala

Yth. 1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)

2. Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan - UNHAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jaharprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
B A N D U N G Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

070/108/L/Rekomlit/KESBAK/2017

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Kasi Idwasbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bogor
Nomor : 070/46-Kesbangpol
Tanggal : 04 Januari 2017
Menerangkan bahwa :

a. Nama	: JUMSIN SOBRI
b. Tlp/Email	: 08151821695/jumsin.sobri@gmail.com
c. Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, 23 September 1977
d. Agama	: Islam
e. Pekerjaan	: Swasta
f. Alamat	: Jl. Merpati II/15 RT 004 RW 006 Kecamatan Pesanggrahan Provinsi DKI Jakarta
g. Peserta	: -
h. Maksud	: Penelitian
i. Keperluan	: Penyusunan Tesis Dengan Judul: Optimalisasi Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sebagai Pusat Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi TPI Depnk Daerah Istimewa Yogyakarta)
j. Lokasi	: DI Yogyakarta
k. Lembaga/Instansi yang dituju	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik D I Yogyakarta

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 April 2017**.

Bandung, 12 Januari 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Masyarakat



ENIH SRI MURNI, SH.MSI

NIP. 19670930 199601 2001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No.5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Februari 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/1077/Kesbangpol/2017
 Penhal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas KKP DIY
 2. Kepala LANAL DIY
 3. Bupati Bantul
 Up. Kepala BAPPEDA Bantul
 Kabupaten Bantul
 Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
 Nomor : 070/108/II/Rekomlit/KESBAK/2017
 Tanggal : 12 Januari 2017
 Penhal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Sesudah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal: "OPTIMALISASI PERAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA (STUDI TPI DEPOK DIY)" kepada

Nama : JUMSIN SOBRI
 Nim : 120150205010
 No. HP/Identitas : 08151821685/3175072309770004
 Prodi/Jurusan : Koamanan Maritim
 Fakultas : Manajemen Perahanan, Universitas Pertahanan
 Lokasi Penelitian : Dinas KKP DIY, LANAL DIY, TPI Depok, BAPPEDA Bantul, Pemda Bantul, Kepolisian Perairan Depok, BPS Bantul
 Waktu Penelitian : 7 Februari 2017 s/d 31 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
 BADAN KESBANGPOL DIY

 AGUS SUPRIYONO, SH
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Pertahanan
3. Yang bersangkutan

Lampiran 4







